



# RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN 2023**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2024 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2023**

## **HALAMAN VERIFIKASI**

Rancangan Rencana Strategis  
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2024 – 2026

Catatan :

## Kata Pengantar



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB merupakan dokumen pemerintah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, indicator dan target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Organisasi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2024-2026, serta dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* jajaran kesehatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon III (Bidang) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat NonEselon ( Fingsional ).

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2014-2026 ini mendapatkan Ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Sidenreng Rappang, 10 April 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB

Kabupaten Sidenreng Rappang,



**H. BASRA, S.Kep, M. Kes**

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19701202 1991031 005

## *Akhtisar Eksekutif*

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-BK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, menurunnya kesakitan karena penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat.

Penyusunan Renstra OPD Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 80/ /II/2021 tanggal Pebruari 2021 tentang Restra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra.

Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kesehatan, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018-2023 dan Penutup.

Selanjutnya Renstra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan- masukan dan perubahan.

*Kata kunci : Pembangunan Kesehatan, Renstra*



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 80/ 37 /DINKES/2023

TENTANG

**RENCANA STRATEGI  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan maksud dan tujuan menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sidenreng Rappang Tahun 20124-2026 terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan ke dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB 2024-2026;
  - b. bahwa Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Renja , RKA/DPA dan sebagai penuntun pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya selama tahun 2024-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
  28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.
- KESATU : Rencana Strategi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang  
Pada Tanggal, 3 April 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Pengendalian Penduduk dan KB  
Kabupaten Sidenreng Rappang,



**Drs. Ns. BASRA, S.Kep, M. Kes**  
Pembina TK.1  
NIP: 19701202 1991031 005

# Daftar Isi

	Hal
Judul .....	I
Halaman Verifikasi.....	II
Kata Pengantar.....	III
Ikhtisar Eksekutif.....	IV
Keputaus Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 80/ /II/2021/DINKES Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Kabupaten sidenreng rappang tahun 2018-2021.....	V
Daftar Isi .....	X
Daftar Tabel.....	XII
Daftar Gambar.....	XIII
Daftar Grafik.....	XIV
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang, .....	1
1.2. Landasan Hukum, .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	17
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB.	34
2.3. 1. Kinerja Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Priode 208 – 20122.....	34 46
2.3. 2. Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan.....	50
2.3. 4. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals ( TPB/SDGs).....	51
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.....	64
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	74
<b>BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan Jangka menegah Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk Dan KB.....	91
4.2. Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk Dan KB .....	93

<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi Perangkat daerah.....	96
5.2. Arah Kebijakan Perangkat daerah.....	96
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	
6. 1 Rencana Program dan Kegiatan .....	100
6. 2. Rencana Pendanaan Indikatif.....	114
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN</b>	
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.....	150
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.....	151
7.3 Indikator Standar Pelauanan Minimal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.....	153
7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Deve- lopment Goals ( TPB/SDGs) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.....	154
<b>BAB. VIII. PENUTUP. ....</b>	<b>158</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Pembangunan kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang setinggi-tingginya. Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun karena masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan berakhir pada tahun 2024, sehingga Dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2024 juga akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang telah dipilih pada tahun 2019.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah secara langsung dan serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam masa transisi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki kepala Daerah yang definitif sehingga berdasarkan arahan Pemerintah Pusat melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 perlu menyusun dokumen perencanaan yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026. Renstra ini disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis diprediksi akan mempengaruhi beberapa perubahan skema-skema perencanaan

dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran, selain itu perencanaan harus bersifat rasional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan). Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan, oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota beserta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunan juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang selaku leading sektor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang selaku penanggungjawab pembangunan di sektor kesehatan menyusun substansi perencanaan strategis untuk menjawab tantangan di bidang kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ini tersusun atas kerja sama dengan SKPK Kesehatan Kabupaten/Kota, dan unsur lintas sektor terkait lainnya, termasuk lembaga-lembaga donor melalui kegiatan forum konsultasi publik di tingkat kabupaten.

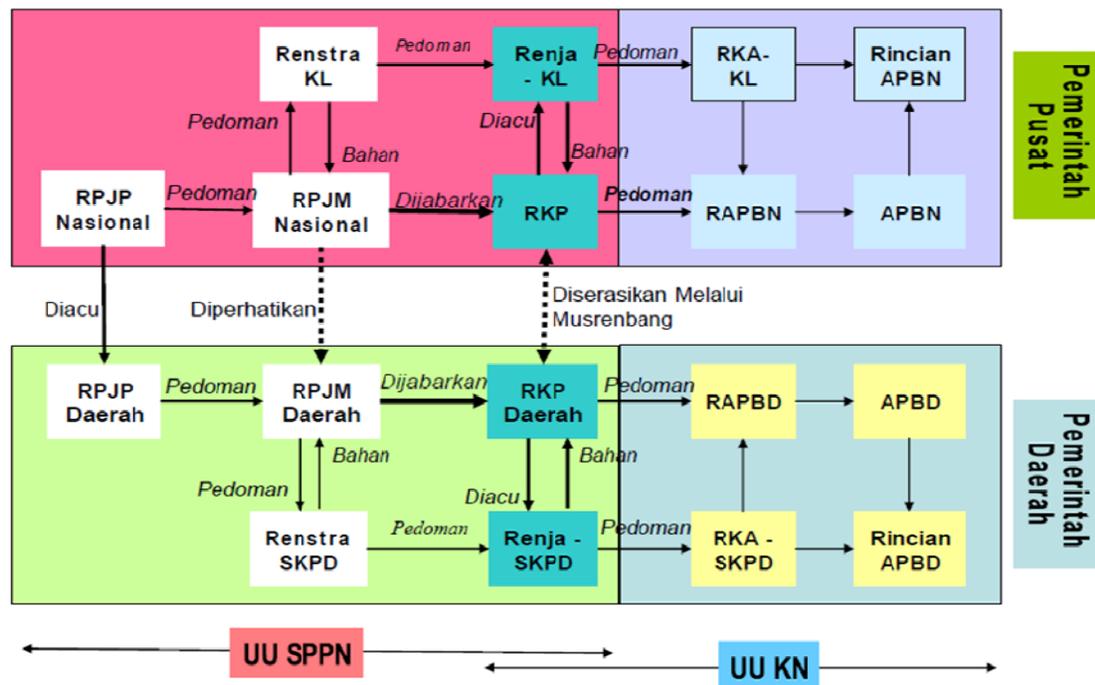
Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor pendukung keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, dinamika perubahan yang terjadi secara nasional maupun global, serta issue strategis yang berkembang.

Sebagai penuntun arah pembangunan kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun yang akan datang, Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang disusun secara sinergis dan saling melengkapi dengan rencana pembangunan kesehatan di kabupaten/kota. Karena itu, Renstra Dinas Kesehatan ini dipandang sebagai suatu rolling plan, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistimatis dapat dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dilingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan aturan terkait dengan sektor kesehatan, kondisi keuangan negara dan daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi eksternal lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renstra ini.

Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Sidenreng Rappang , yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sidenreng Rappang (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terRPDdu dan berkelanjutan

**Gambar 1:1**  
**Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Dan Dengan Renja Perangkat Daerah.**



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
  46. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.

### **1.3 Hubungan antara Dokumen RPD dengan Renstra**

#### **1.3.1 Proses Penyusunan**

Proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang diawali dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemerintah Sidenreng Rappang bertanggung jawab menyusun Rancangan RPD Tahun 2024- 2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra OPD Tahun 2024-2026;
- b. Bappeda Sidenreng Rappang melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPR, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- c. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan

sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;

- d. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra OPD Tahun 2024-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- e. Sebelum ditetapkan menjadi RPD Tahun 2024-2026, Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- f. Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Sidenreng Rappang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- g. RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2024-2026;
- h. Kepala Bappeda Sidenreng Rappang bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2024-2026;
- i. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Konsultasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang terkait penyusunan draft rancangan awal Renstra 2024-2026;
2. Penyusunan draft rancangan awal Renstra pada tanggal bulan januari 2023;
3. Pradesk Renstra lingkup Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang pada bulan Januari 2023;
4. Pelaksanaan desk Renstra pada bulan januari 2023, yang membahas tentang indikator, IKU, IKD dan tabel yang

terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang (tabel T-C.23 sampai dengan tabel T-C.28) dan Evaluasi tabel T-C.27 pada bulan februari 2023;

5. Konsultasi publik pada bulan Februari 2024 di Aula SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang membahas tentang Dokumen Rencana Pembangunan Sidenreng Rappang (RPD);
6. Pembahasan mengenai rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Februari 2023 di Bappeda Sidenreng Rappang;
7. Pra-Desk rancangan akhir Renstra pada tanggal 11 April 2023 di Bappeda Sidenreng Rappang;

### **1.3.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan**

Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang 2024-2026 disusun dengan memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen lainnya, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024.
2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sidenreng Rapaang 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Sidenreng Rapaang (RPD) 2024-2026.
3. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Sidenreng Rapaang Tahun 2018-2023.
4. Memperhatikan isi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidenreng Rapaang 2012-2032

Rencana Pembangunan Sidenreng Rappang (RPD) merupakan salah satu dokumen utama dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Sidenreng Rappang. Rencana Pembangunan Daerah Sidenreng Rapaang 2024-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 pada tanggal 28 Maret 2023. Pada pasal 3 poin a dinyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD.

### **1.3.3 Renstra /KL**

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 menjadi salah satu pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Pasal 2 Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa Renstra Kemenkes 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkes. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa telaahan Renstra Kementerian/Lembaga menjadi salah satu komponen dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud**

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 s/d 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bidang kesehatan maupun sektor terkait lainnya serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan kesehatan Tahun 2024 - 2026.

### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kerangka kerja yang responsive, dinamis dan konsisten yang dapat dibuat pada tingkat kabupaten;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kesinambungan antar ruang, waktu, fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. Menjaga kesinambungan antara Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya;
5. Menjadi pedoman sektor kesehatan untuk menyediakan, mendayagunakan sumber daya kesehatan yang berkeadilan, efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan; dan
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan;
7. Menetapkan indikator kinerja Perangkat daerah (PD) dan Indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
8. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024- 2026 disektor kesehatan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dibagi dalam delapan Bab, dari bab satu sampai dengan bab dua merupakan satu kesatuan substansi dari disusun rancangan renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai bagian dari Penjabaran rancangan awal RPD tahun 2024-2026 khususnya bidang pembangunan kesehatan masyarakat.

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dan jaringannya.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Sidenreng Rappang. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis yang berkembang lima tahun terakhir dan prospeknya lima tahun kedepan.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB,

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Memuat tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan yang harus dipedomani sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

Strategi Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Sedangkan Kebijakan Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Memuat tentang Uraian Rencana Program dan Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2024-2026.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Memuat tentang uraian indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

## BAB. VIII. PENUTUP.

Berisi informasi tentang uraian singkat tentang kesimpulan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pejabaran dari Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang kesehatan. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5). adalah:

1. Membuat perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kesehatan
4. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah dilengkapi dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya, tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pelayanan, masing-masing dapat diuraikan dibawah ini.

#### **2.1 TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

##### **a. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dalam kedudukan di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat di uraikan sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Tugas Pokok**

Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan

## **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

**Fungsi :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris :**

**Tugas Pokok :** Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. 1. **Kepala Sub Bagian Perencanaan :**

**Tugas Pokok :** Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. 2. **Kepala Sub Bagian Keuangan :**

**Tugas pokok :** Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- h. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- i. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- l. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- n. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

2.3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

**Tugas pokok :** Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;

- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :**

**Tugas Pokok :** Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

**Tugas Pokok :** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

4. **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**

**Tugas Pokok :** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan

kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutuhnya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

##### 5. **Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan**

**Tugas Pokok :** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB**

**Tugas Pokok :** Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. **UPT PUSKESMAS ( Operasional Kesehatan/Puskesmas )**

Mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan teknis operasional kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada pada unit-unit pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya. Dalam melaksanakan tugas pokok unit pelaksana teknis operasional Puskesmas mempunyai fungsi

- a. Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan
- b. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan

- c. Pelaksanan Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok. Dan Pelayanan medik dasar yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga
- d. Dan Pelaksanaan tugas lain dalam penyelenggaraan teknis operasional puskesmas dan jaringannya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 8. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan profesi /keahlian masing-masing dan Kebutuhan.

#### **b. Struktur Organisasi**

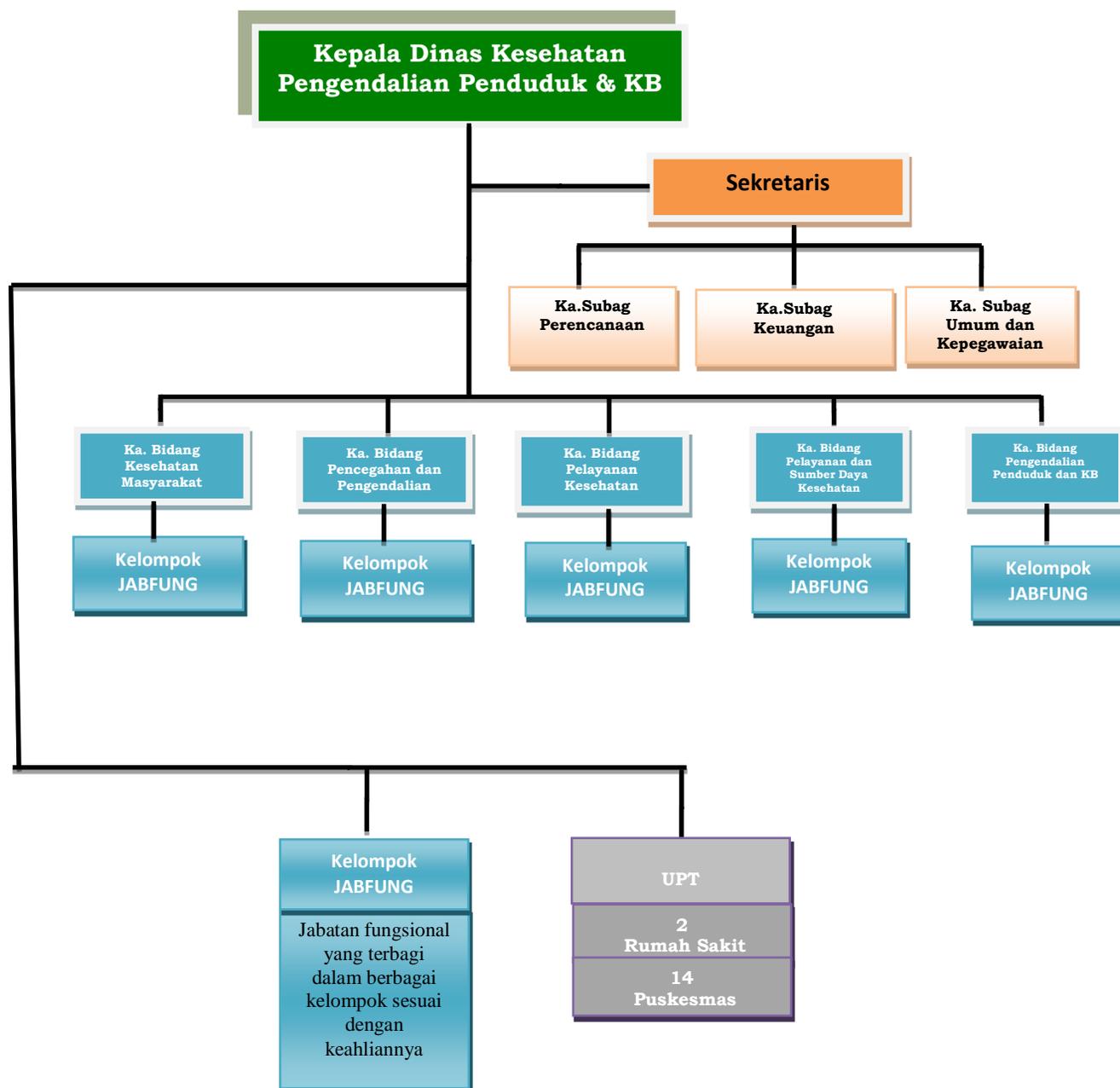
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki susunan organisasi dengan pola maksimal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
  - a. Ka.Sub Bagian Perencanaan
  - b. Ka.Sub Bagian Keuangan
  - c. Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - a. Jabatan Fungsional Keluarga dan Gizi
  - b. Jabatan Fungsional Promosi dan Pemberdayaan masyarakat
  - c. Jabatan Fungsional Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga
4. Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;
  - a. Jabatan Fungsional Surveilans dan Imunisasi

- b. Jabatan Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c. Jabatan Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
    - a. Jabatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Primer
    - b. Jabatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Rujukan
    - c. Jabatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Tradisional
  6. Ka. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
    - a. Jabatan Fungsional Kefarmasian
    - b. Jabatan Fungsional Alat Kesehatan dan PKRT
    - c. Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Kesehatan
  7. Ka. Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - a. Jabatan Fungsional Pengendalian Penduduk
    - b. Jabatan Fungsional Keluarga Berencana
    - c. Jabatan Fungsional Keluarga Sejahtera
  8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu terdiri dari 1 Rumah sakit Type D dan 2 Rumah sakit Type C dan 14 Puskesmas meliputi :
    - a. UPT Rumah sakit Type D sebanyak 1 Rumah sakit
    - b. UPT Rumah sakit Type C sebanyak 2 Rumah sakit
    - c. UPT Puskesmas dengan rawat inap sebanyak 12 puskesmas
    - d. UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap sebanyak 2 puskesmas
  9. Kelompok Jabatan fungsional meliputi Jabatan Fungsional Aktif
    - a. Fungsional Kedokteran
    - b. Fungsional Kedokteran Gigi
    - c. Fungsional Kefarmasian
    - d. Fungsional Administrasi Kesehatan
    - e. Fungsional Epidemiologi
    - f. Fungsional Nutrisi
    - g. Fungsional Keperawatan
    - h. Fungsional Promosi Kesehatan
    - i. Fungsional Sanitarian
    - j. Fungsional Keperawatan Gigi
    - k. Fungsional Kebidanan
    - l. Fungsional Analisis Kesehatan

Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

- a. Sumber Daya Manuisis (SDM) Kesehatan;
- b. Sumber Daya Finansial;
- c. Sumber Daya Barang (Sarana dan Prasarana Fisik)
- d. Sumber Daya Kelembagaan.

### a. Sumber Daya Manuisis (SDM) Kesehatan

Jumlah SDM Aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 550 orang yang terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 5 orang kepala bidang, 15 orang kepala seksi, 14 Kepala UPT Puskesmas, selebihnya sebagai staf dan tenaga fungsional kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan dan unit-unit pelaksana teknis, termasuk Pustu dan Poskesdes.

**Tabel TC-21**  
**Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Kelamin**  
**berdasarkan Pendidikan Golongan dan Esselon**

No	Pendidikan, Golongan dan Eselon	SDM Kesehatan		
		Laki-Laki	Wanita	Jumlah
A	Pendidikan			
1	SD	-	-	8
2	SLTP	-	-	7
3	SLTA	-	-	89
4	SARJANA MUDA/ D.3	-	-	100
5	S.1	-	-	424
6	Lainnya S.2 dan S.3	-	-	62
	JUMLAH	-	-	690
B	Golongan			
1	I	2	-	2
2	II	34	139	173
3	III	71	287	358
4	IV	23	93	116
	JUMLAH	130	560	690
C	Eselon			
1	II	1	-	1
2	III	4	2	6
3	IV	7	11	18
	JUMLAH	12	13	25
D	Non Eselon			
1	Fungsional Umum	28	112	140
2	Fungsional Tertentu	65	455	520
	JUMLAH	93	567	665

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang 2022.

**Tabel T-C 21a**  
**Keadaan Pegawai berdasarkan Eselon**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022**

No	Jabatan	Eselon	Golongan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan	II	IV/c
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	III	IV/b
3	Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat	III	IV/a
4	Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	III	IV/a
5	Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan	III	IV/a
6	Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	III	IV/a
7	Ka. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	III	IV/a
8	Ka.Subag Perencanaan	IV	IV/a
9	Ka. Subag Keuangan	IV	III/d
10	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	IV	III/d
23	Kepala UPT Rumah Sakit Type D		
24	Kepala UPT Rumah Sakit Type C	-	IV
25	Kepala UPT Puskesmas sebanyak 14 orang	-	III & IV

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang 2022.*

**Tabel TC-21b**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Profesi**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021**

NO	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	12	46	58
2	Dokter Gigi	4	16	20
3	Bidan	0	520	520
4	Perawat	163	530	693
5	Keteknisian Medis	14	33	47
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	3	35	38
7	Apoteker	8	40	48
8	Kesehatan Masyarakat	30	113	143
9	Kesehatan Lingkungan	7	33	40
10	Nutrisisionis	2	50	52
	Jumlah :	253	1.192	1.445

Sumber : *Bidang SDK Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2022*

**b. Sumber Daya Finansial Kesehatan**

Sumber Daya Finansial Kesehatan adalah sumber-sumber keuangan berupa pendapatan dari Dinas Kesehatan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diperoleh dari :

1. Pendapatan lainnya yang sah diantara biaya kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang
3. APBN dan APBD Propinsi Sulawesi Selatan.

**c. Sumber Daya Barang**

Sumber daya barang (Sarana prasarana fisik) yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Jaringan Unit Pelaksana Tehnis, beberapa diantaranya disajikan di bawah ini

**Tabel T-C-22**  
**Keadaan Barang (Sarana dan Prasarana)**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022**

Nama Unit Layanan	Kondisi Pusing Roda 4/ mobil Dinas	Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas dr/ drg	Jumlah Rumah Dinas Paramedis	Komputer (Unit)	Pustu (Unit)	Poskesdes (unit)	Kendaraan Roda Dua
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Dinas Kesehatan	17	3	-	-	64	-	-	38
Instal. Farmasi	1	1	-	-	8	-	-	5
PKM Bilokka	3	3	-	1	12	3	10	12
PKM Amparita	4	3	3	6	16	2	5	11
PKM Lawawoi	3	4	1	1	10	7	6	11
PKM Manisa	3	4	2	1	11	1	3	8
PKM Baranti	3	2	1	1	14	3	6	10
PKM Rappang	2	3	2	4	10	3	7	10
PKM Kulo	2	4	1	2	7	3	6	9
PKM Pangkajene	2	3	2	1	20	1	9	10
PKM Empagae	3	1	1	1	16	6	7	11
PKM Lancirang	2	2	1	1	15	3	5	10
PKM Dongi	3	2	1	1	6	4	4	13
PKM Tanru Tedong	2	3	2	4	11	2	9	11
PKM Barukku	2	3	1	4	18	5	9	18
PKM Belawae	2	3	1	4	5	-	4	7
<b>Kabupaten</b>	<b>54</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>243</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>194</b>

Sumber : Bagian Data dan Aset Dinkes Dalduk dan KB

#### **d. Sumber Daya Kelembagaan**

Sumber daya kelembagaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana yang dijelaskan pada tugas pokok dan fungsi serta Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada Bab II ini adalah :

1. Kelembagaan Induk Dinas Kesehatan yang terdiri Unit Pimpinan, Sekretariat dengan 3 Sub Bagian dan 5 Bidang.
2. Kelembagaan Unit Pelaksana Tehnis Operasional, sebagai Unit dengan tugas dan fungsinya bersifat operasional fungsional kesehatan memiliki jaringan kerja berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) sebagai Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Puskesmas dan jaringannya miliki wilayah kerja Desa dan Kelurahan dalam lingkup Kecamatan. Fasilitas kesehatan terdiri dari dua (2) rumah sakit tipe C dan empat belas (14) UPT Puskesmas yang meliputi :

##### **a) UPTD Rumah Sakit Type C**

1. Rumah Sakit Nene Mallomo Pangkajene
2. Rumah Sakit Arifin Nu'Man Rappang

##### **b) UPTD Puskesmas dengan Rawat Inap**

1. UPT Puskesmas Rawat Inap Bilokka Kec. Panca Lautang
2. UPT Puskesmas Rawat Inap Amparita Kec. Tellu Limpoe
3. UPT Puskesmas Rawat Inap Lawawoi Kec. Watang Pulu
4. UPT Puskesmas Rawat Inap Manisa Kec. Baranti
5. UPT Puskesmas Rawat Inap Baranti Kec. Baranti
6. UPT Puskesmas Rawat Inap Kulo Kec. Kulo
7. UPT Puskesmas Rawat Inap Empagae Kec. Watang Sidenreng
8. UPT Puskesmas Rawat Inap Lancirang Kec. Dua Pitue
9. UPT Puskesmas Rawat Inap Dongi Kec. Pitu Riase
10. UPT Puskesmas Rawat Inap Tanru Tedong Kec. Dua Pitue
11. UPT Puskesmas Rawat Inap Barukku Kec. Pitu Riawa
12. UPT Puskesmas Rawat Inap Belawae Kec. Pitu

##### **c) UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap**

1. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Rappang Kec. Panca Rijang
2. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Pangkajene Kec. Maritengngae.

**Tabel T-C.22.1**  
**Sarana dan Prasarana Kesehatan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022**

No	Sarana / Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum Pemerintah	2
2	Rumah Sakit Swasta	1
3	Puskesmas R. Inap	12
4	Puskesmas non R. Inap	2
5	Puskesmas Pembantu	48
6	Puskesmas Keliling	24
7	Posyandu	314
8	Poskedes	90
9	BP/Klinik	1
10	Apotik	58
11	Toko Obat	55
12	Praktek Dokter	65
13	Bidan Praktek	44

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **2.3.1 Kinerja Rentras Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Priode 2019-2022**

Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjelaskan capaian indikator impact dan capaian indikator outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan jajaran kesehatan diseluruh Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, digunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung digambarkan melalui angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka morbiditas (angka kesakitan beberapa penyakit) dan status gizi. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati Sidenreng Rappang dan masyarakat Sidenreng Rappang, capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel TC-2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**TAHUN 2018-2022**

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN</b>																	
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	74.7	80	84,4	92,5	83	0.75	0.80	0.84	20.21	0.83
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	94.7	97.8	100	100	96	0.95	0.98	1.00	0.92	0.96
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	96.8	100	100	100	99	0.97	1.00	1.00	1	0.99
4	Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	79.3	88	86,4	100	82	0.79	0.88	0.86	1	0.82
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	49,7	99,4	99	1.00	1.00	0.50	1	0.99
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	68.6	65.8	43,05	39,8	73	0.69	0.66	0.43	0.99	0.73
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	32.5	61.7	58,69	12,1	76	0.33	0.62	0.59	0.39	0.76
8	Cakupan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	39.4	63.3	23,75	65,3	27	0.39	0.63	0.24	0.12	0.27

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Cakupan Penyandang DM yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	49.8	98.1	44,59	60,7	94	0.50	0.98	0.45	0.65	0.94
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	%	100	100	100	100	100	86.4	73.6	88.2	89.9	96	0.86	0.74	0.88	0.60	0.96
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100	100	100	100	100	66.7	71.6	53.38	82.1	100	0.67	0.72	0.53	0.89	1
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	100	89.6	92.7	80.58	92.8	97	0.90	0.93	0.81	0.82	0.97
	<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>																
13	Jumlah balita Gizi Buruk	Anak	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0.67	1.50	0.67	0.33	0.33
14	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0,007	0,007	0,003	0,001	0.10	14.29	0.07	0.03	0.01
15	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	15	15	15	15	15	1.02	6,88	4,5	4,24	6,16	0.07	2.18	0.30	0.28	0.41
28	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Layanan Umum (Urusan Wajib Dasar)</b>																
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Bayi	10	10	10	10	10	3,5	4	3,7	4,5	1,0	0.35	2.50	0.37	0.45	0.1
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 Bayi	990	990	990	990	990	652	723	649	841	240	0.66	1.37	0.66	0.85	0.24

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Balita	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0,4	0.00	0.00	0	0	0.08
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Neonatal	10	10	10	10	10	0,022	0,023	3	7	10,3	0.00	434.78	0.3	0.7	1.03
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100,000 Kelahiran Hidup	23	23	23	23	23	2	4	6	7	3	0.09	5.75	0.26	0.30	0.13
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 Balita	1;100	1;100	1;100	1;100	1;100	1:77	1:71	1:72	1:73	1:74	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000	1:4.917	1:4.793	1:5.000	1:4.897	1:4.972	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1:100657	1:100657	1:100657	1:100657	1:100657	1:100.657	1:100.659	1:100.663	1:107.731	1:107.735	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1;6616	1;6616	1;6616	1;6616	1;6616	1:6.624	1:6.625	1:6.626	1:6.627	1:6.628	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	1;9934	1;9934	1;9934	1;9934	1;9934	1:8.910	1:8.925	1:8.932	1:8.965	1:8.973	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	131	117	131,4	150	151	1.31	0.85	1.31	1.50	1.51
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	103	96,9	103,3	115	99,7	1.03	1.03	1.03	1.15	1.00
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	99,1	99,7	94,3	99,1	89,6	0.99	1.00	0.94	0.99	0.90

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	99	99	99	99	99	96	99,7	97,9	100	94,2	0.97	0.99	0.99	1.01	0.95
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	2	2	2	2	2	1,26	1,26	1,26	1,50	2,76	1.59	1.59	0.63	0.75	1.38
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	75	75	75	75	75	19,85	9,09	3,89	6,04	9,8	0.26	8.25	0.05	0.08	0.13
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	90	90	90	90	54	50	32	38	63	0.60	1.80	0.36	0.42	0.70
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	337	337	350	270	400	256	199	86	141	202	0.76	1.69	0.25	0.52	0.51
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	1	1	1	1	1	8,6	7,9	6,8	9,9	10,2	8.60	0.13	6.80	9.90	10.20
2.22a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	600	600	600	600	600	765	577	369	426	656	1.28	1.04	0.62	0.71	1.09
2.22b	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	85	85	85	85	85	54	50	32	38	63	0.64	1.70	0.38	0.45	0.74

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.23a	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Kasus	600	600	600	600	600	178	131	193	242	Belum ada data	0.30	4.58	0.32	0.40	0.42
2.23b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85	85	85	85	85	73	66	70	72	Belum ada data	0.86	1.29	0.82	0.85	0.89
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.25	Penderita diare yang ditangani	Kasus	4200	4200	2700	2500	2350	8,637	4,193	2,591	2,069	2,127	2.06	1.00	0.96	0.83	0.91
2.26a	Angka kejadian Malaria	Jiwa	50	50	50	50	50	17	13	3	14	39	0.34	3.85	0.06	0.28	0.78
2.26b	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.03	0.01	0.05	0.13	6.00	0.33	1.00	5.00	13.00
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1000	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.30a	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jiwa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	10	31	16	31	36	100.00	0.00	160.00	310.00	360.00
2.30b	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.003	0.01	0.005	0.01	0.011	0.30	1.00	0.50	1.00	1.10

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	Tidak tersedia a data	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100	96,1	100	117	104	1.00	1.04	1.00	1.17	1.04
2.35	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	42.7	42.7	42.8	42.9	42.1	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	1.00	1.00	1.00	0.10	1.01
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100	100	100	85	79,1	84,6	94,3	85,5	0.85	1.26	0.85	0.94	0.86
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	100	102	97,1	100	100	99,6	1.02	1.03	1.00	1.00	1.00
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	75	75	75	75	75	41	39,9	41,3	57	56,7	0.55	1.88	0.55	0.76	0.76
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100	100	100	88	78,5	88,2	106	99,7	0.88	1.27	0.88	1.06	1.00
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	98,5	100	100	100	1.00	1.02	1.00	1.00	1.00

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.07	1.04	0	0	0	0.98	1.05	0.00	0.00	0.00
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.16	2.28	2.13	2.08	2.19	0.94	1.01	0.93	0.90	0.95
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Klp	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak/ Keluarga	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.16	2.28	2.13	2.08	2.07	0.94	1.01	0.93	0.90	0.90
8.9	Ratio Akseptor KB	%	100	100	100	100	100	58.29	54.71	55.84	56.41	54.29	0.58	1.83	0.56	0.56	0.54
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	100	100	100	100	100	79,76	77,75	76,25	77,63	00	0.80	1.29	0.76	0.78	0.00
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	75	75	75	75	75	40	0	0	0	0	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	100	100	100	100	100	35.1	31.96	0	0	0	0.35	3.13	0.00	0.00	0.00
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	100	100	100	100	100	8.86	12.48	8.86	5.75	8.32	0.09	8.01	0.09	0.06	0.08
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	100	100	100	100	100	14.21	13.26	0	0	0	0.14	7.54	0.00	0.00	0.00

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	100	100	100	100	100	31.13	28.81	0	0	0	0.31	3.47	0.00	0.00	0.00
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Klp	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	0.01	100.00	0.01	0.01	0.01
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	28.3	28.3	28.3	28.3	36.79	0.28	3.53	0.28	0.28	0.37
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	1.04	0.96	1.04	1.04	1.04

No.	Target / Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Lalu					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	76.71	72.35	100	100	100	0.77	1.38	1.00	1.00	1.00
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22	22	22	22	22	20	20	20	20	20	0.91	1.10	0.91	0.91	0.91
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%												0.00	0.00	0.00	0.00

**e. Sumber Daya Kelembagaan**

Sumber daya kelembagaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana yang dijelaskan pada tugas pokok dan fungsi serta Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada Bab II ini adalah :

3. Kelembagaan Induk Dinas Kesehatan yang terdiri Unit Pimpinan, Sekretariat dengan 3 Sub Bagian dan 5 Bidang.
4. Kelembagaan Unit Pelaksana Tehnis Operasional, sebagai Unit dengan tugas dan fungsinya bersifat operasional fungsional kesehatan memiliki jaringan kerja berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) sebagai Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Puskesmas dan jaringannya miliki wilayah kerja Desa dan Kelurahan dalam lingkup Kecamatan. Ada Empat Belas (14) UPT Puskesmas :

**a) UPTD Rumah Sakit Type C**

3. Rumah Sakit Nene Mallomo Pangkajene
4. Rumah Sakit Arifin Nu'Man Rappang

**b) UPTD Puskesmas dengan Rawat Inap**

13. UPT Puskesmas Rawat Inap Bilokka Kec. Panca Lautang
14. UPT Puskesmas Rawat Inap Amparita Kec. Tellu Limpoe
15. UPT Puskesmas Rawat Inap Lawawoi Kec. Watang Pulu
16. UPT Puskesmas Rawat Inap Manisa Kec. Baranti
17. UPT Puskesmas Rawat Inap Baranti Kec. Baranti
18. UPT Puskesmas Rawat Inap Kulo Kec. Kulo
19. UPT Puskesmas Rawat Inap Empagae Kec. Watang Sidenreng
20. UPT Puskesmas Rawat Inap Lancirang Kec. Dua Pitue
21. UPT Puskesmas Rawat Inap Dongi Kec. Pitu Riase
22. UPT Puskesmas Rawat Inap Tanru Tedong Kec. Dua Pitue
23. UPT Puskesmas Rawat Inap Barukku Kec. Pitu Riawa
24. UPT Puskesmas Rawat Inap Belawae Kec. Pitu

**c) UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap**

3. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Rappang Kec. Panca Rijang
4. UPT Puskesmas Non Rawat Inap Pangkajene Kec. Maritengngae.

**Tabel T-C.22.1**  
**Sarana dan Prasarana Kesehatan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Sarana / Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Rumah Sakit Umum Pemerintah	2
2	Rumah Sakit Swasta	1
3	Puskesmas R. Inap	12
4	Puskesmas non R. Inap	2
5	Puskesmas Pembantu	48
6	Puskesmas Keliling	24
7	Posyandu	314
8	Poskedes	90
9	BP/Klinik	1
10	Apotik	58
11	Toko Obat	55
12	Praktek Dokter	65
13	Bidan Praktek	44

## **A. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DI BIDANG KESEHATAN**

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB memuat tentang gambaran umum pelayanan, Capaian kinerja (didasarkan atas hasil evaluasi), SPM dan indikator kinerja pelayanan Kesehatan, Pengelolaan pendanaan pelayanan Kesehatan. Gambaran umum pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan, dan program dan kegiatan yang ingin dicapai.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Lampiran I Pemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dilakukan analisis gambaran umum pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.

Pencapaian anggaran dan realisasi pendanaan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 Tahun. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diuraikan secara singkat pada tabel Tc-24 dibawah ini:

**Tabel TC-2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2017 - 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertambahan (Rp)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	120,353,456,000	90.007.741.000	-	-	-	76,632,270,768	71.062.795.989	-	-	-	81	64	-	-	-	0.39	12.95
Belanja Tidak Langsung	36,544,521,000	40.165.700.000	-	-	-	34,966,559,295	39.856.299.780	-	-	-	95	96	-	-	-	3.43	2.24
Belanja Pegawai	61,546,246,000	52,308,882,000	58.757.674.000.	43.488.962.00	46.240.521.000	52,323,262,285	51,234,285,725	55.288.645.152	42.295.827.754	23.125.102.517	98,16	85,02	97,95	97,32	97,38	3.43	2.24
Belanja Barang dan Jasa	78,322,857,000	55,109,545,000	35.017.529.604	32.350.067.100	25.133.470/020	47,072,314,206	44,451,443,481	25.405.630.058	40.742.556.009	23.125.102.517	78,05	60,10	80,66	71.20	80,85	3.43	2.24
Belanja Modal	17,029,874,000	22,755,014,000	20.247.579.000	28.904.380.400	37.235.110.980	13,507,472,328	15,233,366,563	15.321.521.432	30.484.886.685	36.528.629.561	87,52	79,32	66,95	92.26	95,43	3.43	2.24
Belanja Daerah	156,897,977,000	130.173.441.000	111.515.077.000	133.823.280.940	113.252.374.200	111,598,830,063	110.919.095.769	96.015.796.642	113.523.280.448	104.814.078.495	85	71	86.10	84.83	92.55	1.93	3.27

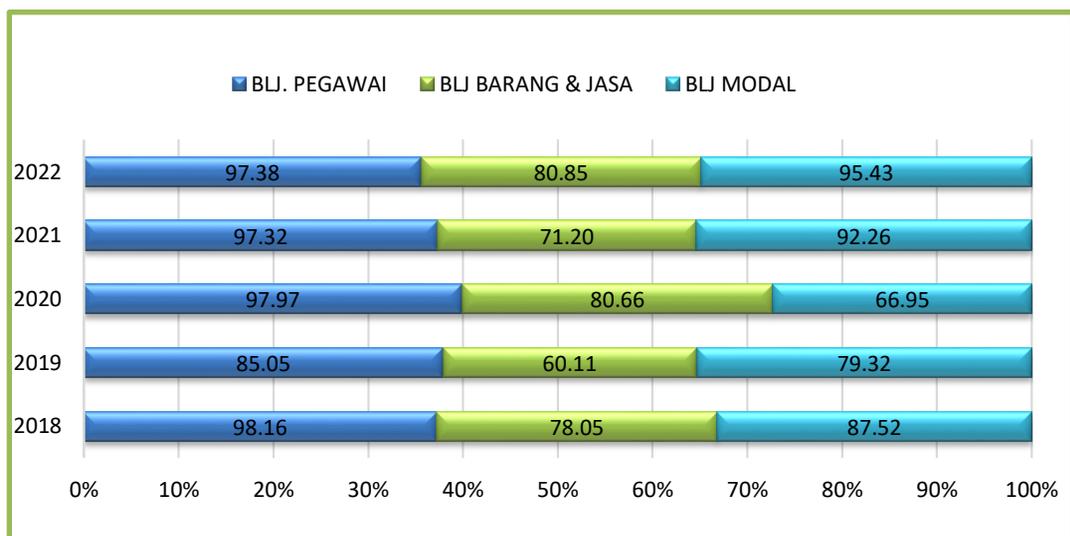
**Grafik 2.4.a**  
**Komposisi Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kab Sidenreng Rappang Tahun 2018-2019**



Sumber Data : Dinkes, Dalduk dan KB

Sampai dengan tahun 2019, struktur belanja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB masih didominasi oleh Belanja Langsung. Pada tahun 2019, sekitar 58,7% dari total Belanja dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan sisanya sekitar 41,3% untuk Belanja Langsung.

**Grafik 2.4.b**  
**Komposisi Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kab Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2022**



Sumber Data : Dinkes, Dalduk dan KB

Dalam lima tahun terakhir, struktur belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB masih didominasi oleh Belanja Pegawai. Lebih dari setengah total Belanja yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Namun proporsi Belanja Pegawai cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir.

### 2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel. 2.3.2

#### Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	83
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	96
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100	82
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	99
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	73
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	76
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	27
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	94
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	96
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	100	97

### 2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals ( TPB/SDGs)

Tabel. 2.3.3

#### Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals ( TPB/SDGs ) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 -2022

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)</b>						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	-	-	-	-	-
6.2.1.(b)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel
<b>2</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)</b>						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	66	63	67,20	-	-
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	100	100	100	99,7
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	36,7	89	67,1	64,4	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	79,76	77,75	76,25	77,63	54,29

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)</b>						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	7.2	6.88	4.5	4.24	6,16
2.1.1.*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	11.4	9.81	8.4	7.12	6,31
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	11.4	9.81		6.71	6,51
2.2.1.*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	1.35	1.96	0.01	0.01	1,98
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	5.24	13.6	10,51	12,40	8,67
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	61	55.83	68.61	59.44	64,5
<b>4</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)</b>						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	kasus	2	4	6	7	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	100	100	100	100	99,7
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	100	100	100	99,3
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per1000	0	0	0	0	0,4
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per1000	0.022	0.023	3	7	10,3
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	per1000	0.035	0.04	3.7	0,045	1,0
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	0.96	0.97	100	100	100
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,4/10000	1,4/10.000	0,005	0,01	0,0011

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		256	199	86	141	202
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		17	13	3	14	39
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		24 (Kusta)	20 (Kusta)	18	22	23
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		4,8	5,4	11	11,6	-
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		0.338	0.38	0,56	0,65	0,2
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		0.154	0.154	0,25	0,32	0,39
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		11	11	11	11	11
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		Data dari Kepolisian				
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		Data dari Kepolisian				
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		1	1	1	1	1
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		0.7976	0.7775	54.82	47.39	-
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		0.1251	0.1466	6065	6528	-
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		0.416	0.4	40	41.6	-
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		0.0214	0.0228	2.13	2.08	2.19
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		0.05	0.1248	8.86	5.75	8.32

No.	Target / Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		316.048	191.652	-	-	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		1.05	0.63	-	-	-
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		-	-	-	-	-
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		85	87	85	88	90
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		1.38	1.40	1.42	1.45	1.48
<b>5.</b>	<b>PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesetaraan Gender)</b>						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		0.05	0.1248	8.86	5.75	8.32
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		0.2989	0.5569	-	-	-

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Hasil analisis terhadap RPD, Renstra Kementerian Kesehatan RI, dan Renstra Kabupaten menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah upaya untuk mempercepat penurunan stunting, Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi.

Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di daerah terpencil.

Sistem Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatur upaya mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui kolaborasi bersama masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan serta mengupayakan suatu Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan akibat kejadian luar biasa dan bencana.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan. Ketersediaan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan jejaringnya terus ditingkatkan. Perhatian pemerintah Aceh untuk menjamin ketersediaan layanan Kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Daerah juga merupakan hal yang sangat strategis. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

**a. Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten serta Renstra PD Propinsi**

Komparasi capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra K/L dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4.1**  
**Komparasi Sasaran Renstra PD Kabupaten/kota**  
**terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L**

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b>				
1.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2015 capai 305 dan target 183 tahun 2024
2	Persentase Anak Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Anak Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup / Jumlah Kematian Bayi	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) Tahun 2015 capai 24 dan target 16 tahun 2024
3	Persentase Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup / Jumlah Kematian Neonatal	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Tahun 2019 capai 27,7% dan target 14 % tahun 2024
4	Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup / Jumlah Kematian Balita	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) Tahun 2018 capai 10,2% dan target 7 % tahun 2024
5	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) Tahun 2018 capai 0,24 dan target 0,8 tahun 2024
6	Persentase Keselamatan ibu Melahirkan	Persentase Keselamatan ibu Melahirkan		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2017 capai 319 dan target 190 tahun 2024
7	Persentase Pemenuhan Obat difasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat difasilitas Kesehatan		Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
8	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
9	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat		Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
10	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
11	Persentase Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persentase Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
12	Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat Atau Reakreditasi	Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat Atau Reakreditasi	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
13	Partisipasi Aktif Desa Dan Kelurahan Bidang Kesehatan	Partisipasi Aktif Desa Dan Kelurahan Bidang Kesehatan		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)
14	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlatih	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlatih		
15	Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan	Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan		
16	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan di Apotek dan Pasar	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan di Apotek dan Pasar		
17	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit		
18	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang di Bangun	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang di Bangun		
19	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/ Diperbaiki	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/ Diperbaiki		
20	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
21	Persentase Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan	Persentase Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan		
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>				
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat mencapai 2,13 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,06 pada 2024.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat mencapai 2,13 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,06 pada 2024.	

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,82 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 56,28 persen pada tahun 2024.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,82 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 56,28 persen pada tahun 2024.	
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,86 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,17 persen pada 2024.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,86 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,17 persen pada 2024.	
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun,	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 40 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 29 per 1.000 kelahiran pada 2024.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 40 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 29 per 1.000 kelahiran pada 2024.	
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 56,69 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,55 pada tahun 2024	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 56,69 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,55 pada tahun 2024	
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	

## **b. Hasil telaahan terhadap RTRW**

Kebijakan Nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata, baik dikawasan perkotaan, maupun dikawasan pedesaan.

Dengan diberlakukannya Kebijakan Nasional yang didukung oleh penguatan Kebijakan Daerah terhadap penataan ruang tersebut, maka tidak adalagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang , pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sangsi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik, agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau strategi Environmental Assesment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategic dalammenuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatip terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inhern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP), posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena itu tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW) . KLHS

bisa menentukan substansi RTRW, dapat memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer), atau tambahan (*suplementer*) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “ *bio – region* “ dan / atau “ *bio – geo – region* “ )

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformative, dan substantive. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya, berdasarkan literature terkait sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*)
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Enviromental Appraisal*)
3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assesment Sustainability Appraisal*)
4. KLHS sebagai Pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau pengelolaan berkelanjutan sumber daya (*Sustainable Resource Management*)

Aplikasi pendekatan diatas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup Isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi focus, konteks kerangka hukum RTRW

yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan SDM aparatur Pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS serta tingkat kemauan.

Aplikasi kajian lingkungan hidup strategis bidang kesehatan lingkungan dapat memberi banyak masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, bahwa setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan wajib melakukan kajian berbagai aspek kegiatan yang dapat menimbulkan resiko gangguan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat bila secara langsung atau tidak langsung berada dilokasi kegiatan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam lainnya, juga dapat menimbulkan resiko penyakit berbasis lingkungan seperti malaria dan diare di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan demikian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan lingkungan sebagai salah satu kajian yang strategis untuk merumuskan dan menentukan serta mengarahkan perencanaan dan penyusunan RTRW yang lebih efektif dan komprehensif.

Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang harus mengedepankan pembangunan kesehatan beberapa hal yang berdampak pada bidang kesehatan antara lain :

1. Pembangunan Industri (pabrik-pabrik) dan Perusahaan tambang yang dapat mengakibatkan munculnya pencemaran lingkungan di sekitar wilayah proyek, untuk itu diperlukan telaah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
2. Limbah-Limbah Medis yang belum dikelola sesuai dengan Standar dikarenakan belum adanya IPAL Puskesmas.
3. Pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya yang mengurangi lahan-lahan produktif.
4. Kondisi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang rendah sehingga selalu terjadi Banjir.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB serta UPT Puskesmas dan jaringannya dalam lima tahun ke depan adalah

1. Kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya KLB dan adanya potensi bencana.
2. Banyaknya tempat perkembangbiakan vektor penular penyakit.

3. Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah dan mobilisasi penduduk yang tinggi ( Masih banyak penyakit endemis dan penyakit menular lainnya : TBC, DBD, HIV/AIDS dan Diare )
4. Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat.
5. Rendahnya ekonomi masyarakat dan sosial budaya yang menghambat PHBS.
6. Bimbingan teknis kesehatan dan non kesehatan yang disediakan pemerintah belum mencukupi kebutuhan keseluruhan pengawai Dinas Kesehatan baik struktural maupun Fungsional termasuk staf dan pelaksana program.
7. Masih adanya kematian Ibu dan Bayi dengan penyebab avoidable
8. Masih adanya gizi buruk pada balita dan kasus stunting
9. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM)

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan dan Jaringan Unit Pelaksana Tehnis ( UPT Puskesmas ) adalah :

1. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan,
3. Akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau
4. Pelaksanaan administrasi program kesehatan yang berbasis jaringan interkoneksi.
5. Dan upaya-upaya kesehatan yang pada tahun-tahun sebelum sulit untuk direalisasikan pada lima tahun kedepan terbuka peluang untuk segera di realisasikan. Misalnya menjadikan semua Puskesmas yang ada untuk terstandar akreditasi .
6. Adanya regulasi yang mendukung upaya kesehatan baik di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Pelaksanaan Program Jaminan Nasional (JKN) merupakan peluang bagi unit-unit pemberi layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, juga peningkatan sarana layanan kesehatan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Peluang ini sangat penting bukan saja untuk meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidupnya peserta JKN sekaligus juga peningkatan kesejahteraan petugas kesehatan terhadap jasa dari pelayanan yang diberikan.

Sementara peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Pusat maupun Kabupaten, dapat memberikan peluang bagi setiap pelaksana atau petugas kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pengguna layanan.

Bekerja dengan administrasi program yang berbasis jaringan interkoneksi, bukan saja mempercepat layanan kesehatan tetapi juga ketersediaan data dan alur pelaporan akan semakin mudah untuk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baik untuk keperluan pengambilan keputusan diagnose dan pengobatan penyakit tetapi juga keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan.

Menjadikan Puskesmas yang terstandar akreditasi dalam memeberikan pelayanan kesehatan merupakan peluang strategis dari pengelolaan Kapitasi JKN dan pelaksanaan progam dan kegiatan puskesmas secara baik dan bertanggung jawab.



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB III.**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan

**A. Permasalahan Internal**

Bila dibandingkan dengan SPM masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel T-B.3.6 Dari beberapa masalah tersebut ada beberapa masalah yang menjadi prioritas yang perlu dilakukan sekarang, sebagai berikut :

**1. *Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya***

Permasalahan yang sering terjadi di puskesmas adalah ketersediaan obat yang kurang atau berlebih dan adanya obat yang telah kadaluwarsa atau rusak yang masih ditemukan di tempat penyimpanan obat. Masalah ini di pengaruhi oleh pengelolaan obat dan BMHP yang kurang baik. pengelolaan obat dan BMHP yang kurang baik bias di sebabkan karena pihak puskesmas kurang mengetahui cara pengelolaan obat yang baik dan benar di puskesmas. Pengelolaan Sediaan farmasi/obat dan BMHP merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional. Tingkat ketersediaan obat dan BMHP di seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 80% dari semestinya 90 % Standar yang ada.

## **2. Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.**

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar untuk pelayanan kesehatan masyarakat, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar akreditasi merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ( puskesmas, Puseksmas Pembantu dan poskesdes ) yang belum memenuhi standar ( Ruang puskesmas, alat kesehatan dan jumlah SDM Kesehatan), fakta ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal kesehatan.

## **3. Pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu Belum Sesuai Standar**

Dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir profil kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang angka kesakitan atau morbiditas masih didominasi oleh penyakit infeksi yang lama seperti ISPA, Malaria, Diare, TBC, kusta dan Covid-19. Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (community based data) menunjukkan infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

## **4. Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar**

Cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan kunjungan pemeriksaan keempat adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, minimal empat kali kunjungan selama masa kehamilannya (sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua dan dua kali di

trimester ketiga). Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat perlindungan dan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Cakupan kunjungan ke 4 ibu hamil ( K4) pada tahun 2015 sebesar 83,8%, sedikit menurun dari tahun 2019 sebesar 86,23%. Cakupan K4 masih belum memenuhi target standar pelayanan minimal sebesar 95%. Dengan demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan antenatal pada ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **5. Masih banyaknya neonatus dengan komplikasi yang belum tertangani dengan baik**

Pada saat memberi pelayanan kesehatan pada neonatus, sekitar 15% diantara neonatus yang diperiksa dan ditemui tergolong dalam kasus resiko tinggi yang butuh pelayanan rujukan. Neonatal risti/ komplikasi yaitu bayi usia 0-28 hari dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian seperti asfiksia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan kurang dari 2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan dan kelainan neonatal.

Berdasarkan laporan yang ada jumlah perkiraan neonatal risti di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 1.731 orang. Cakupan neonatal risti yang ditangani tertinggi berada di beberapa wilayah Puskesmas sedangkan cakupan terendah di wilayah puskesmas yaitu 37,3%. Dari data tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Kasus BBLR serta AKB yang cukup tinggi dan berdasarkan survei pendahuluan didapatkan bahwa kinerja bidan desa dalam pelayanan neonatal pada BBLR belum optimal, pencatatan hasil pelayanan neonatal belum dilaksanakan dengan baik, fasilitas/alat belum dimanfaatkan secara maksimal

#### **6. Alokasi anggaran tidak mencukupi biaya kebutuhan**

Dengan otonomi daerah, terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk pembangunan kesehatan. Tiap sektor harus mampu bersaing untuk mendapatkan kuota anggaran yang terbatas di daerah, untuk membiayai pembangunan dengan memiliki perencanaan yang baik dan kemampuan meyakinkan pembuat keputusan

anggaran tentang pentingnya suatu program. Bila dihubungkan dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menetapkan alokasi kesehatan minimal 10 % dari Dana APBD.

## **B. Permasalahan Eksternal**

1. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat tahun 2015 adalah masih jauh dari target nasional yaitu 80 %. Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang berbasis lingkungan (penyakit menular) masih tinggi.
2. Kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan terhambatnya akses pelayanan kesehatan. Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari dataran rendah dan rawa – rawa dengan ketinggian berkisar 0–50 meter diatas permukaan laut yang dilintasi beberapa sungai. Sehingga sering terjadi banjir yang juga menyebabkan rawan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Disamping itu keadaan lingkungan yang menjadi tempat perindukkan vektor penular penyakit. Keadaan geografis ini menghambat akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat.
3. Dinamika epidemiologi penyakit cepat berubah Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus demam berdarah, HIV/AIDS dan Covid-19 merupakan kasus import dari penduduk yang bepergian keluar dan masuk ke wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATN</b>		
1.	Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas masih capai 80 % sedangkan target 90 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketersediaan obat dengan DOEN dan Fornas dan pola penyakit belum sesuai standar</li> <li>✓ Masih ditemukan obat rusak dan kadaluarsa di puskesmas</li> <li>✓ Serta adanya peningkatan waktu kekosongan obat sesudah JKN,2).</li> <li>✓ Permintaan belum optimal, distribusi yang tidak cukup dan merata dari IFK, kurangnya SDM kefarmasian dan dukungan biaya distribusi obat</li> </ul>
2.	Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu untuk menampung pasien.	Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur</li> <li>✓ Kurangnya dana Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah.</li> <li>✓ Kendala pembebasan lahan Pembebasan lahan kadang kala juga menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.</li> </ul>
3.	Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dalam kondisi rusak serta ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat terbatas	Sarana kesehatan masih ada rusak dan prasana yang sesuai standar masih sangat terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih ada PUSTU Rusak Berat (terjadi kerusakan pada komponen pokok dari bangunan seperti pilar, pondasi, sloope.</li> <li>✓ Pengadaan alat kesehatan di pustu tidak masuk dalam DAK</li> <li>✓ Penyelenggaraan kalibrasi alat kesehatan yang digunakan pada fasilitas kesehatan belum maksimal</li> </ul>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil belum capai target SPM (100%)</li> <li>✓ Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM) 100% Masih tingginya penyakit infeksi / menular di masyarakat (COVID-19)</li> </ul>	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas pelayanan selama kunjungan Antenatal (pemeriksaan kehamilan) kurang memadai</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cakupan K1 dan K4 ibu hamil yang masih rendah</li> <li>✓ Pelayanan komplikasi kebidanan belum optimal</li> </ul>	Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih ada bidan yang belum terlatih tentang standar pelayanan kebidanan.</li> <li>✓ Puskesmas PONEB masih kurang</li> <li>✓ Adanya tenaga yang sudah terlatih di Mutasi</li> </ul>
6.	Masih banyaknya neonatus dengan komplikasi yang belum tertangani dengan baik.	Masih kurangnya pemantauan dan Pelacakan asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih kurangnya pemantauan asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk.</li> <li>✓ Masih rendahnya manajemen penanganan BBLR dan penanganan Aksfisia bayi baru lahir</li> <li>✓ Pelayanan kesehatan neonatal belum sesuai standar</li> </ul>
<b>B. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>			
1.	Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan	Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;</li> </ul>
2.	Kurangnya promosi atau sosialisasi tentang KB pria dikarenakan kebijakan KB di Indonesia yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan	Masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sebagian besar wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping</li> <li>✓ Pada kalangan pria, yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB</li> <li>✓ Aspek sosial budaya masyarakat Indonesia;</li> </ul>
3.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.	Masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan</li> <li>✓ Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).</li> </ul>

**Tabel T-B.36**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas**  
**Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang kurang</li> <li>✓ Belum semua desa memiliki tenaga bidan didesa</li> <li>✓ Belum optimalnya kemitraan bidan dan dukun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terlaksananya kegiatan AMP secara rutin</li> <li>✓ Terlaksananya peningkatan kompetensi nakes untuk peningkatan kegawatdaruratan pada bayi</li> </ul>
2.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	Peran Lintas sektor Masih rendah	Peningkatan pengetahuan orantua tentang pola pengasuhan balita yang baik
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola posyandu</li> <li>✓ Masih rendahnya kesadaran orang tua tentang manfaat posyandu</li> </ul>	Peningkatan pengetahuan orantua tentang pola pengasuhan balita yang baik
4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ulangan ke 4</li> <li>✓ Rendahnya keterlibatan suami dan keluarga</li> </ul>	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan kasus kegawatdaruratan pada neonatal
5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ulangan ke 4</li> <li>✓ Rendahnya keterlibatan suami dan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terlaksananya audit maternal neonatal untuk mengkaji penyebab kematian ibu</li> <li>✓ Terlaksananya peningkatan kompetensi nakes dalam kegawatdaruratan maternal</li> </ul>
6.	Rasio posyandu per satuan balita	>	Letak Geografis, serta jumlah kepadatan penduduk dalam suatu wilayah posy.	Pembentukan posyandu berbasis Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	<	Letak Geografis	Pembangunan puskesmas minimal satu puskesmas tiap kecamatan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	=	Tidak ada penambahan rumah sakit	Penambahan jumlah tempat tidur di rumah sakit
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	>	Formasi tenaga dokter yang diterima	Penambahan jumlah tenaga dokter/ kontrak
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	<	Formasi tenaga medis yang diterima	Penambahan jumlah tenaga medis/ kontrak
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	=	Prasarana Kebidanan yang belum memadai	Semua komplikasi kebidanan ditangani sesuai standar
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	>	adanya persalinan non fasyankes karena kondisi geografis	Pelayanan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yg terstandar
13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	<	Kadang ada pemahaman masyarakat tertentu bahwa vaksin imunisasi itu haram	Pelayanan imunisasi dasar lengkap sudah berjalan sesuai standar serta tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya imunisasi pada bayi
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	=	Tingkat pengetahuan orang tua balita tentang gizi anak masuk kurang dan factor ekonomi keluarga	Balita gizi buruk ditangani dengan rawat jalan/rawat inap melalui tata laksana kasus gizi buruk
15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	>	Kadang ada pemahaman masyarakat tertentu bahwa vaksin imunisasi itu haram	Pelayanan imunisasi dasar lengkap sudah berjalan sesuai standar karena kompetensi juru imunisasi di lapangan serta tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya imunisasi pada bayi
16.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	>	Adanya transmisi virus polio liar.	Pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan harus terus ditingkatkan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	<	Koordinasi lintas program dilaksanakan namun masih kurang dalam komunikasi tentang kelompok yang terserang TBC BTA	Dukungan Keluarga pasien TBC
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	<	Kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi serta riwayat alami TB	Dukungan Keluarga pasien TBC
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	>	Kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi serta riwayat alami TB	Dukungan Keluarga pasien TBC
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	<	Pasien kadang merasa malu untuk datang berobat/memeriksakan diri di puskesmas jika hanya batuk	Dukungan Keluarga pasien TBC
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	<	kadang ada pasien yang tidak datang ambil obat jika habis obatnya	Dukungan Keluarga pasien TBC
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	=	Musim hujan yang tidak menentu dan lingkungan yang tidak bersih	Adanya kader Jumantik
23	Penderita diare yang ditangani	<	Masyarakat lebih banyak beli sendiri obat diare	Tingkat pengetahuan masyarakat ttg penanganan pertama penyakit diare
24	Angka kejadian Malaria	<	Kondisi lingkungan yang kurang bersih	Program jumat bersih
25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<	Adanya Faktor Prediktor Atopi pada Pasien HIV/AIDS	Pengetahuan masyarakat tentang HIV
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<	Masih banyak masyarakat tak mau dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan karena jarak	Akses pelayanan kesehatan yang memadai
27	Cakupan kunjungan bayi	<	Adanya kasus Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) dan kasus Lahir Mati	Tingkat pengetahuan orang tua tentang kesehatan bayi
28	Cakupan puskesmas	=	Kualitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pusat	Program Kesehatan dasar dan program kesehatan pengembangan berjalan di puskesmas

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
29	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	=	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah umur kehamilan 12 minggu.</li> <li>Mobilisasi penduduk yang tinggi.</li> <li>Banyaknya kasus abortus dan persalinan preterm</li> </ol>	Review dan Validasi Pemantauan Wilayah Setempat KIA
30	Cakupan pelayanan nifas	>	Rendahnya Partisipasi keluarga terhadap ibu nifas	Semua ibu nifas mendapatkan pelayanan sesuai standar
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	<	Kurangnya Kasus yang ada	Orientasi petugas dalam deteksi dini dan penanganan kompliksai Neonatal
32	Cakupan pelayanan anak balita	<	adanya sasaran anak balita yang tidak menetap	Sosialisasi kelas ibu balita bagi kader kesehatan, guru PAUD/TK/RA Tk. Kab. Sidrap
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	<	Ada beberapa balita sasaran yg tdk mengkomsumsi makanan pemdamping selama 90 hari makan anak	Partisipasi kader posyandu /kesehatan terhadap anak balita keluarga miskin
34	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	=	Masih ada anak sekolah yang tidak hadir waktu pelaksanaan penjangkaran	Semua sasaran penjangkaran mendapatkan pelayanan sesuai standar
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	=	Kadang ada masyarakat yang enggang datang berobat ke puskesmas	Adanya pelayanan kesehatan masyarakat semesta ( Bukan masyarakat miskin saja tapi masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan)
36	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	=	Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kejadian luar biasa yang masih kurang cepat	Tersedianya tenaga surveilans terlatih di setiap puskesmas

### **3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan bidang kesehatan, tidak terlepas dari banyak sedikitnya dukungan lintas program dan lintas sektoral untuk hal tersebut. Maka para pemegang amanah kesehatan seharusnya sering melakukan advokasi dalam rangka mendapatkan dukungan. Pekerjaan advokasi akan sangat ditentukan oleh seberapa kematangan dalam men-design isu strategis dan langkah-langkah pelaksanaannya.

Karena isu strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan atau masalah kebijakan paling mendasar yang mempengaruhi pekerjaan advokasi selanjutnya. Dalam menentukan isu strategis pada Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

#### **A. Isu Strategis Global**

##### **1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)**

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindak lanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
- 2) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
- 3) Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
- 4) Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
- 5) Tujuan 5: Kesetaraan Gender, meliputi 5 target
- 6) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
- 7) Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target
- 8) Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
- 9) Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
- 10) Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
- 11) Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
- 12) Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target

- 13) Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, meliputi 2 target
- 14) Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
- 15) Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
- 16) Tujuan 16: Perdamaian Keadialan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
- 17) Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

## **2. Perubahan Iklim**

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan

peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total

hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO<sub>2</sub>eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah- daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

### **3. Bonus Demografi**

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi

berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Isu Strategis Nasional / Lingkungan Kementerian Kesehatan**

### **1. Standar Pelayanan Minimal. ( SPM )**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;

- g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan kesehatan juga menjadi salah satu dari enam urusan konkuren (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM yang dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepala daerah, serta akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Kementerian Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).

## **2. *Disparitas status kesehatan antar wilayah***

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan

masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angkakematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan gizi buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

### **3. Jaminan Kesehatan Nasional.**

Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta JKN membawa konsekuensi terhadap tuntutan ketersediaan pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sehingga terjadi keadilan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik antar wilayah, antar kelas sosial ekonomi, dan antara penduduk desa dan kota.

Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau supply side dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Sejak tahun pertama beroperasi, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Secara sederhana, defisit terjadi ketika klaim lebih besar dari pendapatan premi. Hal ini disebabkan karena pembayaran premi jauh lebih kecil dari perkiraan kebutuhan secara aktuarial. Dari analisis data yang ada sampai tahun 2018, terlihat bahwa claim ratio paling tinggi terjadi pada PBPU (peserta mandiri) sampai mendekati 500%. Sementara PPU untuk Klas I dan Klas II cenderung rendah (tidak sampai 100%). Untuk PBI claim ratio terus naik, sampai akhir tahun 2018 sudah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa untuk peserta mandiri telah terjadi adverse selection (peserta yang risiko tinggi dan sudah sakit cenderung ikut JKN-BPJS Kesehatan). Dalam konteks ini, tampak seakan-akan PBI dan PPU memberikan subsidi kepada peserta mandiri.

#### **4. *Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga***

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perlu dilakukan review ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan adanya muatan lokal sesuai masalah kesehatan lokal, desentralisasi manajemen pengelolaan data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah alat manajemen puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

### **C. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **1. *Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat***

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

## **2. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.**

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dari 34 provinsi di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

### **3. Pengguna Kontrasepsi Modern**

Pengguna kontrasepsi modern di Sulawesi Selatan masih cukup rendah ditambah kondisi peningkatannya tidak terlalu significant berdasarkan dua hasil SDKI terakhir sebagai berikut: Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) meningkat dari 47.5 persen (SDKI 2012) menjadi 48.7 persen (SDKI 2017). Beberapa faktor penyebab tidak signifikkannya penambahan jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

## **D. Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang**

### **1. Pilkada Serentak Tahun 2024**

Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain faktor efisiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarnya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

### **2. Pelayanan Kesehatan**

Adanya permasalahan dalam pelayanan kesehatan dan memperhatikan telaahan rencana strategis Kementerian Kesehatan RI, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup maka dilakukan identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), Peluang (Opportunitas), dan tantangan (treats) kemudian dinalisis dengan analisa SWOT. Hasil evaluasi strategi dengan analisis SWOT didapat peta kekuatan Dinas Kesehatan pada Kuardan I, yang berarti memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing. Strategi yang digunakan adalah mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang. Kunci keberhasilan yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil penilaian faktor nilai keterkaitan, bobot faktor, nilai dukungan, nilai

keterkaitan didapatkan beberapa faktor kunci keberhasilan yang menjadi tujuan pada Dinas Kesehatan.

<b>FAKTOR KEKUATAN DAN PELUANG KUNCI</b>			
<b>NO.</b>	<b>KEKUATAN KUNCI</b>	<b>PELUANG KUNCI</b>	<b>ALTERNATIF TUJUAN</b>
1	Adanya standar pelayanan minimal kesehatan dan standar operasional tindakan medis dan non medis di unit pelayanan kesehatan	Adanya BOK, JKN dan Jampersal	Mengoptimalkan BOK, JKN dan Jampersal Puskesmas untuk Meningkatkan pencapaian SPM
2	Komitmen bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan	Adanya Posyandu dan desa siaga	Meningkatkan komitmen SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan
3	Kerjasama antar petugas dinkes, puskesmas dan RS yang baik	Adanya kerjasama Toga, Toma dan lintas sektor	Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta stekholder
4	Tersedianya SDM dalam berbagai jabatan fungsional	Adanya dukungan pengembangan SDM Kesehatan	Mewujudkan SDM yang profesional

Adapun isu-sisu strategis dari hasil analisis SWOT dan dengan melihat hasil telaahan Renstra Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat tiga tahun mendatang adalah :

1. Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya
2. Kuantitas dan kualitas Sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar belum memadai.
3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu.
4. Masih ada ibu nifas yang belum memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar :

Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu

menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;

5. Rendahnya Cakupan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Masih tingginya jumlah Kematian Ibu melahirkan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah bidan, dokter umum dan dokter spesialis yang membantu proses persalinan yang mengalami kegawatdaruratan dan masih banyak ibu hamil yang mengalami anemia, sehingga memicu kegawatdaruratan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat kesiapsiagaan persalinan.

6. Peningkatan jaminan, sarana kesehatan, kefarmasian/obat dan alat kesehatan masih belum memadai.

7. Peran serta masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan yang masih rendah.

Peningkatan peran serta Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026 Penjabaran telahaan di atas. Melalui peningkatan Kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik. Khususnya Urusan Kesehatan dengan

sasaran membaiknya indeks kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tiga tahun kedepan.



## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun renstra perangkat daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional

Serta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah “ Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”*

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan strategisnya langsung ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, pada tujuan 2 dan sasaran 3 yaitu :

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas SDM

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPD yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan tujuan strategis berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu :  
“*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*” yang optimal dengan indikator tujuan “*meningkatnya indeks kesehatan*” bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu “ *Terwujudnya keluarga sejahtera*“ dengan indikator tujuan “ *Indeks pembangunan keluarga (Bangga)*” Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **4.2. CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, maka ada 2 (dua) sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut :

### **1. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

a. *Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran sebagai berikut :*

1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup
3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

### **2. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB**

a. *Sasaran 2 :Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran sebagai berikut :*

1. Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total

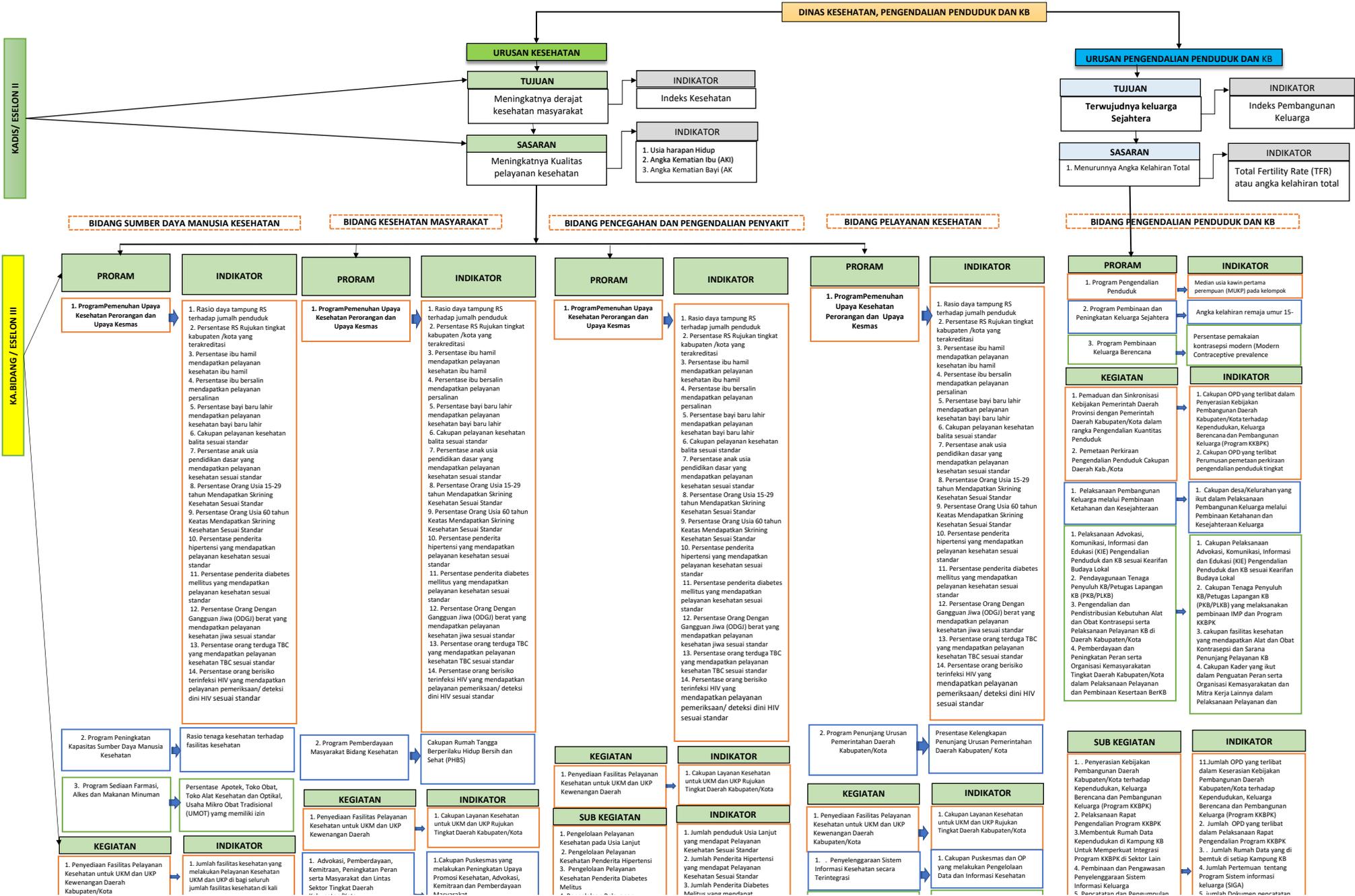
Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka pendek Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel TC- 2.5**  
**Cascading Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b>							
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Indeks Kesehatan	indeks	77,55	78,75	78,95	79,25
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Usia Harapan Hidup ( UHH )	Tahun	70.41	70,80	71,40	71,80
		3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Penduduk	3	5	4	4
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Penduduk	1,0	1	0,8	0,8
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera		5. Indeks Pembangunan Keluarga ( Bangsa)	indeks	58,20	60	61	62
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	6. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata jumlah anak	2,07	2,05	2,05	2,08

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan.

**CASCADING DAN POHONG KINERJA TAHUN 2022  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas kesehatan SIP</li> <li>2. Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Cakupan tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>2. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</li> <li>3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin</li> <li>2. Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikasi Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</li> <li>3. Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan</li> </ol>
<p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</li> <li>2. Pembangunan Puskesmas</li> <li>3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</li> <li>4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>6. engadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan</li> <li>7. Pengadaan Obat, Vaksin</li> <li>8. Pengadaan Bahan Habis Pakai</li> <li>9. Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</li> <li>2. Pembangunan Puskesmas</li> <li>3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</li> <li>4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>6. pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan</li> <li>7. Pengadaan Obat, Vaksin</li> <li>8. Pengadaan Bahan Habis Pakai</li> <li>9. Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT</li> <li>2. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan No.P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yg diproduksi oleh IRT</li> <li>3. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT</li> <li>2. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan No.P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yg diproduksi oleh IRT</li> <li>3. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah</li> </ol>	<p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</li> <li>8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</li> <li>9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> <li>10. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</li> <li>11. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>2. Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>3. Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>4. Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>5. Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>6. Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>7. Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat</li> <li>8. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar</li> <li>9. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> <li>10. Jumlah Rumah tangga berprilaku Hidup bersih dan sehat</li> <li>11. Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Puskesmas/Posyandu aktif yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>2. Jumlah Rumah tangga yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat</li> <li>3. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</li> <li>5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</li> <li>7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</li> <li>8. Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li> <li>9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</li> <li>11. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</li> <li>12. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional</li> <li>13. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</li> <li>14. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</li> </ol>	<p>meitius yang menaopat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>5. Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>6. Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>7. Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelay. Kesehatan</li> <li>8. Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li> <li>9. Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan</li> <li>10. Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Tidak Menular yang mendapat pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Sekolah</li> <li>12. Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</li> <li>13. Jumlah Puskesmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</li> <li>14. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini</li> </ol>
---	--

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ol>	<p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya</li> <li>2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</li> <li>3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</li> <li>5. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya</li> <li>2. Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</li> <li>3. Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Jumlah Puskesmas yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas</li> <li>5. Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>	<p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) <li>2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIKRS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> <li>3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</li> <li>4. Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK</li> <li>5. Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK</li> </p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</li> <li>4. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</li> <li>5. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</li> <li>6. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</li> <li>7. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> <li>8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>9. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>10. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>11. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>12. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>13. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</li> <li>14. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>15. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</li> <li>16. Peningkatan Kesertaan KB Pria</li> <li>17. Pembinaan Terpadu Kampung KB</li> </ol>	<p>1. Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS <li>2. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga &amp; UPPKS</li> <li>3. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</li> <li>4. Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK</li> <li>5. Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK</li> </p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga</li> <li>6. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>2. Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>3. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</li> <li>4. Jumlah PKB/PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK</li> <li>5. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</li> <li>6. Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK</li> <li>7. Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK</li> <li>8. Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>9. Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>10. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>11. Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>12. Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>13. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompetensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi</li> <li>14. Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi &amp; SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>15. Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</li> <li>16. Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MKJP)</li> <li>17. Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB</li> </ol>
---	--

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS</li> <li>2. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga &amp; UPPKS</li> <li>3. Jumlah Kelompok yang di tempat pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</li> <li>4. Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK</li> <li>5. Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>2. Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>3. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</li> <li>4. Jumlah PKB/PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK</li> <li>5. Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</li> <li>6. Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK</li> <li>7. Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK</li> <li>8. Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>9. Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>10. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>11. Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>12. Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>13. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompetensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi</li> <li>14. Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi &amp; SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>15. Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</li> <li>16. Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MKJP)</li> <li>17. Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB</li> </ol>
--	--



## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perencanaan strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan
6. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
7. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
8. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

### **5.2 ARAH KEBIAJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun kebijakan program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditempuh melalui:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**

Tujuna 2 :		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas SDM					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
<b>1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>		✓ Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan	Meningkatakan upaya promotif dan preventif di dukung oleh inovasi dan teknologi	Meningkatkan regulasi dan tata kelola program kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan terintegrasi
	<b>A. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan</b>	✓ Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	Meningkatkan penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (Continuum of Care),	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
	1. Angka Usia Harapan Hidup	✓ Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Memperkuat kolaborasi lintas program/lintas sektor	Meningkatkan regulasi dan tata kelola program kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan terintegrasi
	2. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup	✓ Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan di fasilitas kesehatan			
3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	✓ Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
<b>2. Terwujudnya keluarga sejahtera.</b>		Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
	<b>A. Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran sebagai berikut :</b>	Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)			
	1. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/ jejaring yang melayani KBKR			



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Rencana program kegiatan, Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dibagi dalam dua kategori yaitu program dan rutin dan Program prioritas masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **6. 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan permendagri no.90 tahun 2019 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
6. Program pengendalian penduduk
7. Program pembinaan keluarga berencana (kb)
8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)

## **A. Program dan Kegiatan Rutin**

### 1. Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

### 2. Kegiatan

- 1) *Kegiatan 1* : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) *Kegiatan 2* : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 3) *Kegiatan 3* : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) *Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*  
**Sub Kegiatan**
  1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
  3. Pengolahan Data Retribusi Daerah
  4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) *Kegiatan 5 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*  
**Sub Kegiatan**
  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  8. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) *Kegiatan 6 : Administrasi Umum Perangkat Daerah*  
**Sub Kegiatan**
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7) *Kegiatan 7 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*  
**Sub Kegiatan**
  1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Mebel
  4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) *Kegiatan 8* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

***Sub Kegiatan***

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) *Kegiatan 9* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

***Sub Kegiatan***

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. Program dan Kegiatan Prioritas ( Bidang Kesehatan )**

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- 1) *Kegiatan 1* : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

***Sub Kegiatan :***

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Pembangunan Puskesmas
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

5. Pengembangan Rumah sakit
  6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah sakit
  7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
  8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
  10. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  11. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  12. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  13. Pengadaan Obat, Vaksin
  14. Pengadaan Bahan Habis Pakai
  15. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  17. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  18. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  19. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2) *Kegiatan 2* : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :**
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
  10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
  11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
29. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
30. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
31. Operasional Pelayanan Puskesmas
32. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
33. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
34. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
35. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
36. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
38. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

39. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

40. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

41. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

- 3) *Kegiatan 3* : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

**Sub Kegiatan :**

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

- 4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) *Kegiatan 2* : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
  3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

- 1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 2) *Kegiatan 2* : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
  2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) *Kegiatan 3* : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

5) *Kegiatan 5* : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

**Sub Kegiatan :**

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

6) *Kegiatan 6* : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

**Sub Kegiatan :**

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

#### 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1) *Kegiatan 1* : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

***Sub Kegiatan :***

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

***Sub Kegiatan :***

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

**C. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB**

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- 1) *Kegiatan 1* : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

***Sub Kegiatan :***

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
5. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
6. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
7. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

8. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
9. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
10. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
11. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
12. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
13. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
14. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
15. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

***Sub Kegiatan :***

1. Perumusan Parameter Kependudukan
2. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
3. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4. Pemetaan Kependudukan
5. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
6. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
7. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
8. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
10. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

## 6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- 1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

### **Sub Kegiatan :**

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
8. Pengendalian Program KKBPK

- 2) *Kegiatan 2* : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

### **Sub Kegiatan**

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3) *Kegiatan 3* : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

***Sub Kegiatan***

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
  3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
  5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  7. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
  8. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  9. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
  10. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  11. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  12. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
  13. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 4) *Kegiatan 4* : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

***Sub Kegiatan***

1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

#### 4. Pembinaan Terpadu Kampung KB

### 7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

#### **Sub Kegiatan**

1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
8. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
9. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
10. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK

11. Advokasi dan Promosi IPK
12. Sosialisasi IPK
13. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

***Sub Kegiatan***

1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

**6. 2. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program kesehatan kurun waktu 2024 – 2026 pada Tabel TC-27. berikut :

Tabel TC-27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KB</b>					254,052,906,368		279,458,197,005		307,404,016,705		840,915,120,078	
1.02	<b>BIDANG URUSAN KESEHATAN</b>					248,329,297,768		273,162,227,545		300,478,450,299		821,969,975,612	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	100	170,430,723,468	100	187,473,795,815	100	206,221,175,396	100	564,125,694,679	
1.02.01.02.01	<b>Perencanaan, Panggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	21,000,000	3	23,100,000	3	25,410,000	3	69,510,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyus. Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3,000,000	3	3,300,000	3	3,630,000	3	9,930,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	12,000,000	3	13,200,000	3	14,520,000	3	39,720,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	100	100	79,628,580,468	100	87,591,438,515	100	96,350,582,366	100	263,570,601,349	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Dokumen	3	3	79,528,580,468	3	87,481,438,515	3	96,229,582,366	3	263,239,601,349	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntanssi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.07	Koordinasi Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	3	40,000,000	3	44,000,000	3	48,400,000	3	132,400,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Admistrasi Barang Milik Daerah</b>	%	100	100	137,500,000	100	151,250,000	100	166,375,000	100	455,125,000	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	47,500,000	3	52,250,000	3	57,475,000	3	157,225,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	15,000,000	6	16,500,000	6	18,150,000	6	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	%	100	100	<b>36,000,000</b>	100	<b>39,600,000</b>	100	<b>43,560,000</b>	100	<b>119,160,000</b>	
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retrebusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retrebusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Dokumen	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04.05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	3	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	29,790,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</b>	%	100	100	<b>202,000,000</b>	100	<b>222,200,000</b>	100	<b>244,420,000</b>	100	<b>668,620,000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	7,500,000	3	8,250,000	3	9,075,000	3	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	7,500,000	12	8,250,000	12	9,075,000	12	24,825,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.05	Monitoring dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	5	15,000,000	5	16,500,000	5	18,150,000	5	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Dokumen	1	1	152,000,000	1	167,200,000	1	183,920,000	1	503,120,000	Dinkes, Dalduk dan KB
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>536,845,000</b>	<b>100</b>	<b>590,529,500</b>	<b>100</b>	<b>649,582,450</b>	<b>100</b>	<b>1,776,956,950</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	3,825,000	12	4,207,500	12	4,628,250	12	12,660,750	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	66,000,000	3	72,600,000	3	79,860,000	3	218,460,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	9,500,000	3	10,450,000	3	11,495,000	3	31,445,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan ketersediann Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	397,520,000	12	437,272,000	12	480,999,200	12	1,315,791,200	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	35,000,000	3	38,500,000	3	42,350,000	3	115,850,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07	<b>Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerak</b>	%	100	100	<b>575,000,000</b>	100	<b>632,500,000</b>	100	<b>695,750,000</b>	100	<b>1,903,250,000</b>	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	255,000,000	1	280,500,000	1	308,550,000	1	844,050,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	827,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	66,200,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan alat mesin lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	100	15,309,740,000	100	16,840,714,000	100	18,524,785,400	100	50,675,239,400	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Bulan	12	12	2,451,840,000	12	2,697,024,000	12	2,966,726,400	12	8,115,590,400	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Umum pelayanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12,852,900,000	12	14,138,190,000	12	15,552,009,000	12	42,543,099,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	%	100	100	528,718,000	100	581,589,800	100	639,748,780	100	1,750,056,580	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraan	257	257	262,000,000	257	288,200,000	257	317,020,000	257	867,220,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan	257	257	176,218,000	257	193,839,800	257	213,223,780	257	583,281,580	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	9	9	500,000	9	550,000	9	605,000	9	1,655,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab	
					2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	mesin	5	5	75,000,000	5	82,500,000	5	90,750,000	5	248,250,000	Dinkes, Dalduk dan KB	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	%	100	100	73,426,340,000	100	80,768,974,000	100	88,845,871,400	100	243,041,185,400		
1.02.01.2.20.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	16	16	73,426,340,000	16	80,768,974,000	16	88,845,871,400	16	243,041,185,400	Dinkes, Dalduk dan KB	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,12	0,13	74,452,803,300	0,14	81,898,083,630	0,15	90,087,891,993	0,15	246,438,778,923		
		2. Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83,12	100		100		100		100		100	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,54	100		100		100		100		100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,40	100		100		100		100		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	82,25	100		100		100		100		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,73	100		100		100		100		
		8. Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	72,97	100		100		100		100		
		9. Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	75,86	100		100		100		100		
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	27,46	100		100		100		100		
		11. Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,31	100		100		100		100		
		12. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	96,35	100		100		100		100		
		13. Persentase orang terduga TBC yang mendapat kan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	%	100	100		100		100		100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		14. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	%	97,33	100		100		100		100		
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia</b>	%	100	100	44,565,960,000	100	49,022,556,000	100	53,924,811,600	100	147,513,327,600	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Unit	1	1	24,315,960,000	1	26,747,556,000	1	29,422,311,600	1	80,485,827,600	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Unit	1	1	650,000,000	1	715,000,000	1	786,500,000	1	2,151,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Unit	0	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	1	1,158,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Unit	1	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	1,331,000,000	1	3,641,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	3	1,900,000,000	3	2,090,000,000	3	2,299,000,000	3	6,289,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	3,310,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	3	827,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Rehabilitasi dan mendapat Pemeliharaan	Unit	2	2	650,000,000	2	715,000,000	2	786,500,000	2	2,151,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	3,310,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Unit	1	1	2,000,000,000	1	2,200,000,000	1	2,420,000,000	1	6,620,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	16	17	2,000,000,000	17	2,200,000,000	17	2,420,000,000	17	6,620,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Unit	55	55	2,500,000,000	55	2,750,000,000	55	3,025,000,000	55	8,275,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Unit	23	23	4,800,000,000	23	5,280,000,000	23	5,808,000,000	23	15,888,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	4	4	1,500,000,000	4	1,650,000,000	4	1,815,000,000	4	4,965,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	0	2	100,000,000	2	110,000,000	2	121,000,000	2	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Unit	5	5	380,000,000	5	418,000,000	5	459,800,000	5	1,257,800,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman	PKM	14	14	20,000,000	14	22,000,000	14	24,200,000	14	66,200,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	100	<b>28,975,843,300</b>	100	<b>31,873,427,630</b>	100	<b>35,060,770,393</b>	100	<b>95,910,041,323</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ibu Hamil	5.945	5.958	1,868,150,500	6.008	2,054,965,550	6.065	2,260,462,105	6.065	6,183,578,155	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ibu Bersalin	6.608	6.700	289,994,000	6.720	318,993,400	6.750	350,892,740	6.750	959,880,140	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bayi	5.403	5.414	310,101,900	5.551	341,112,090	5.612	375,223,299	5.612	1,026,437,289	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	24.902	24.952	983,175,000	25.050	1,081,492,500	25.100	1,189,641,750	25.100	3,254,309,250	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Siswa	54.192	54.670	412,185,400	54.780	453,403,940	54.992	498,744,334	54.992	1,364,333,674	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	193.400	194.892	1,158,663,000	194.991	1,274,529,300	195.092	1,401,982,230	195.092	3,835,174,530	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Usia Lanjut	20.808	20.907	662,476,000	21.102	728,723,600	21.212	801,595,960	21.212	2,192,795,560	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.592	17.810	384,464,000	17.860	422,910,400	17.895	465,201,440	17.895	1,272,575,840	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.734	2.768	671,951,000	2.799	739,146,100	2.876	813,060,710	2.876	2,224,157,810	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	600	550	237,226,000	545	260,948,600	540	287,043,460	540	785,218,060	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5.725	5.839	652,996,000	5.877	718,295,600	5.999	790,125,160	5.999	2,161,416,760	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7.677	7.663	517,272,000	7.600	568,999,200	7.400	625,899,120	7.400	1,712,170,320	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	PKM	14	14	210,200,000	14	231,220,000	14	254,342,000	14	695,762,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana	Jumlah Puskesmas pada Kondisi terdampak krisis kesehatan akibat bencana yang melakukan Pelayanan Kesehatan	PKM	14	14	200,000,000	14	220,000,000	14	242,000,000	14	620,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Orang	40.159	40.169	4,207,785,000	40.368	4,628,563,500	40.612	5,091,419,850	40.612	13,927,768,350	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	PKM	14	14	604,511,000	14	664,962,100	14	731,458,310	14	2,000,931,410	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PKM	14	14	391,450,000	14	430,595,000	14	473,654,500	14	1,295,699,500	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	tangga	41.483	44.934	445,854,500	45.090	490,439,950	45.964	539,483,945	45.964	1,475,778,395	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	PKM	14	14	210,000,000	14	231,000,000	14	254,100,000	14	695,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PKM	14	14	533,950,000	14	587,345,000	14	646,079,500	14	1,767,374,500	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	PKM	14	14	50,000,000	14	55,000,000	14	60,500,000	14	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	orang	200	220	689,541,000	231	758,495,100	252	834,344,610	252	2,282,380,710	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	PKM	14	14	300,000,000	14	330,000,000	14	363,000,000	14	993,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	orang	17.919	17.919	1,168,426,000	18.100	1,285,268,600	18.300	1,413,795,460	18.300	3,867,490,060	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	14.500	14.650	9,464,163,000	14.800	10,410,579,300	15.05	11,451,637,230	15.05	31,326,379,530	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Orang	1.400	1.500	180,000,000	1.550	198,000,000	1.670	199,980,000	1.670	577,980,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	PKM	14	14	140,000,000	14	154,000,000	14	155,540,000	14	449,540,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kec.	11	11	150,000,000	11	165,000,000	11	166,650,000	11	481,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat Telemedicine	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan	RS	2	3	160,000,000	3	176,000,000	3	193,600,000	3	529,600,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	PKM	14	14	120,000,000	14	132,000,000	14	145,200,000	14	397,200,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PKM	14	14	50,000,000	14	55,000,000	14	60,500,000	14	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	PKM	0	10	173,258,000	14	190,583,800	14	209,642,180	14	573,483,980	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	PKM	14	14	448,050,000	14	492,855,000	14	542,140,500	14	1,483,045,500	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	PKM	14	14	125,000,000	14	147,500,000	14	172,250,000	14	444,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Unit	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tuberkulosis	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan HIV (ODHIV)	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan malaria	PKM	14	14	105,000,000	14	115,500,000	14	127,050,000	14	347,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Cakupan Puskesmas dan OPD yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</b>	%	100	100	<b>761,000,000</b>	100	<b>837,100,000</b>	100	<b>920,810,000</b>	100	<b>2,518,910,000</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan data informasi Kesehatan	PKM/ Dinkes/ RS	15	18	5,000,000	18	5,500,000	18	6,050,000	18	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PKM/ Dinkes/ RS	15	18	6,000,000	18	6,600,000	18	7,260,000	18	19,860,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	PKM/ Dinkes	0	14	750,000,000	14	825,000,000	14	907,500,000	14	2,482,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terbit</b>	%	100	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	496,500,000	
1.02.02.2.04 .01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit dan Fasyankes yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas D	RS/PKM	0	17	15,000,000	17	15,500,000	17	16,665,000	17	48,165,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04 .02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan Fasyankes yang mendapatkan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RS/PKM	0	17	15,000,000	17	15,500,000	17	16,665,000	17	48,165,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04 .03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan Peningkatan Mutu pelayanan	PKM	14	14	100,000,000	14	110,000,000	14	121,000,000	14	331,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.02.2.04 .04	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah rumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan yang tersedia	Dokumen	0	1	20,000,000	1	22,000,000	1	22,220,000	1	64,220,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan</b>	%	80	80	1,292,000,000	85	1,421,200,000	87	1,563,320,000	87	4,276,520,000	
1.02.03.2.01	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP</b>	%	100	100	25,000,000	100	27,500,000	100	30,250,000	100	82,750,000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	orang	1.300	1.400	25,000,000	1.450	27,500,000	1.500	30,250,000	1.500	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Orang	100	100	467,000,000	100	513,700,000	100	565,070,000	100	1,545,770,000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	3	4	37,000,000	5	40,700,000	6	44,770,000	6	122,470,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	50	100	405,000,000	150	445,500,000	200	490,050,000	200	1,340,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	3	4	25,000,000	4	27,500,000	4	30,250,000	4	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.03.2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	100	800,000,000	100	880,000,000	100	968,000,000	100	2,648,000,000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	80	90	800,000,000	100	880,000,000	110	968,000,000	110	2,648,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin</b>	%	100	100	845,679,000	100	930,246,900	100	1,023,271,590	100	2,799,197,490	
1.02.04.2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin</b>	%	100	100	134,132,000	100	147,545,200	100	162,299,720	100	443,976,920	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	sarana	110	115	50,000,000	120	55,000,000	125	55,550,000	125	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumeyang tersedia tentang Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	34,132,000	1	37,545,200	1	37,920,652	1	109,597,852	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.01.013	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	sarana	110	115	50,000,000	120	55,000,000	125	55,550,000	125	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<b>Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat</b>	%	100	100	371,547,000	100	408,701,700	100	449,571,870	100	1,229,820,570	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	sarana	10	10	189,038,000	10	207,941,800	10	228,735,980	10	625,715,780	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan	sarana	10	10	182,509,000	10	200,759,900	10	220,835,890	10	604,104,790	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikasi Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	%	100	100	180,000,000	100	198,000,000	100	217,800,000	100	595,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifi kt Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PIRT	95	100	180,000,000	105	198,000,000	110	217,800,000	110	595,800,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.04.2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi</b>	%	100	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	364,100,000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat Pengawasan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	TPM	60	60	110,000,000	60	121,000,000	60	133,100,000	60	364,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.04.2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan</b>	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	PIRT	95	100	50,000,000	105	55,000,000	110	60,500,000	110	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>	%	70	75	1,308,092,000	75	1,438,901,200	80	1,582,791,320	80	4,329,784,520	
1.02.05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	%	100	100	142,272,000	100	156,499,200	100	172,149,120	100	470,920,320	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu aktif	225	243	142,272,000	255	156,499,200	267	172,149,120	267	470,920,320	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.05.2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat</b>	%	100	100	165,820,000	100	182,402,000	100	200,642,200	100	548,864,200	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	41.100	41.483	44.934	165,820,000	48.385	182,402,000	51.836	200,642,200	51.836	548,864,200	Dinkes, Dalduk dan KB
1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	%	100	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	3,310,000,000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	UKBM	150	155	1,000,000,000	160	1,100,000,000	165	1,210,000,000	165	3,310,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>BIDANG URUSAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>5,723,608,600</b>		<b>6,295,969,460</b>		<b>6,358,929,155</b>		<b>18,378,507,215</b>	
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun</b>	Tahun	22	22.10	1,271,572,600	22.20	1,398,729,860	22.20	1,538,602,846	22.20	4,208,905,306	
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)</b>	%	100	100	115,572,600	100	127,129,860	100	139,842,846	100	382,545,306	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab./Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penyusunan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	OPD	26	26	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah OPD yang terlibat dalam Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	OPD	26	26	5,000,000	26	5,500,000	26	5,555,000	26	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	1	5,000,000	26	5,500,000	26	5,555,000	26	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	26	11,000,000	26	11,110,000	26	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Balai KB	11	11	30,000,000	11	33,000,000	11	33,330,000	11	96,330,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Balai KB yang melakukan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Balai KB yang melakukan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Balai KB yang melakukan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Balai KB yang melakukan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	5,555,000	11	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah OPD yang terlibat dalam Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	OPD	26	26	5,000,000	26	5,500,000	26	5,555,000	26	16,055,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah OPD yang terlibat dalam Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	OPD	26	26	15,572,600	26	17,129,860	26	17,301,159	26	50,003,619	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten</b>	%	100	100	1,156,000,000	100	1,271,600,000	100	1,398,760,000	100	3,826,360,000	
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Dokumen Perumusan Parameter Kependudukan	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen pemetaan Kependudukan yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah balai KB yang melakukan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Balai KB	11	11	10,000,000	11	11,000,000	11	11,110,000	11	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/ Peringatan Dini)	Jumlah balai KB yang melakukan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/ Peringatan Dini)	Balai KB	11	11	10,000,000	11	11,000,000	11	11,110,000	11	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang di bentuk di setiap Kampung KB	Rumah data	15	15	50,000,000	15	55,000,000	15	60,500,000	15	165,500,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	kali	1	1	340,000,000	1	374,000,000	1	377,740,000	1	1,091,740,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	32,110,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	76,000,000	1	83,600,000	1	84,436,000	1	244,036,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	Dokumen	1	1	550,000,000	1	605,000,000	1	611,050,000	1	1,766,050,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah balai KB yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Balai KB	11	11	50,000,000	11	55,000,000	11	55,550,000	11	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)</b>	<b>Persen</b>	<b>77.63</b>	<b>100</b>	<b>2,477,036,000</b>	<b>100</b>	<b>2,724,739,600</b>	<b>100</b>	<b>2,997,213,560</b>	<b>100</b>	<b>8,198,989,160</b>	
2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>745,036,000</b>	<b>100</b>	<b>819,539,600</b>	<b>100</b>	<b>901,493,560</b>	<b>100</b>	<b>2,466,069,160</b>	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Balai KB	11	11	303,036,000	11	333,339,600	11	366,673,560	11	1,003,049,160	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang mendapatkandistribusi Sarana KIE Program KKBPK	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Balai KB yang melaksanakan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.04	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang menggunakan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Balai KB	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	27,775,000	11	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Balai KB yang melaksanakan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Balai KB	11	11	50,000,000	11	55,000,000	11	55,550,000	11	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Balai KB	11	11	242,000,000	11	266,200,000	11	268,862,000	11	777,062,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang melakukan Pengendalian Program KKBPK	Balai KB	11	11	50,000,000	11	55,000,000	11	55,550,000	11	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK</b>	%	100	100	276,000,000	100	303,600,000	100	333,960,000	100	913,560,000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	PKB	30	30	54,000,000	30	59,400,000	30	65,340,000	30	178,740,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	KB	11	11	12,000,000	11	13,200,000	11	14,520,000	11	39,720,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	PKB	30	30	10,000,000	30	11,000,000	30	12,100,000	30	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	kader	444	445	200,000,000	446	220,000,000	447	242,000,000	447	662,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</b>	%	100	100	1,241,000,000	100	1,365,100,000	100	1,501,610,000	100	4,107,710,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PUS	43.966	44.987	342,000,000	46.008	376,200,000	47.029	379,962,000	47.029	1,098,162,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah faskes yang melakukan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang melakukan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	faskes	17	17	50,000,000	17	55,000,000	17	55,550,000	17	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	faskes	17	17	700,000,000	17	770,000,000	17	777,700,000	17	2,247,700,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Faskes yang melakukan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	faskes	17	17	15,000,000	17	16,500,000	17	18,150,000	17	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesproduksi	faskes	17	17	15,000,000	17	16,500,000	17	18,150,000	17	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompetensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi	faskes	17	17	10,000,000	17	11,000,000	17	12,100,000	17	33,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi & SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	faskes	17	17	25,000,000	17	27,500,000	17	27,775,000	17	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	faskes	17	17	24,000,000	17	26,400,000	17	29,040,000	17	79,440,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Balai KB yang melakukan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Balai KB	11	17	25,000,000	17	27,500,000	17	27,775,000	17	80,275,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	Balai KB	11	11	5,000,000	11	5,500,000	11	6,050,000	11	16,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB</b>	<b>Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB</b>	%	100	100	215,000,000	100	236,500,000	100	260,150,000	100	711,650,000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Kader yang mendapatkan pelatihan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	kader	449	454	165,000,000	459	181,500,000	464	183,315,000	464	529,815,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang melakukan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor	Kampung KB	15	15	20,000,000	15	22,000,000	15	22,220,000	15	64,220,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK	Kampung KB	15	15	15,000,000	15	16,500,000	15	18,150,000	15	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	Kampung KB	15	15	15,000,000	15	16,500,000	15	18,150,000	15	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)</b>	Nilai	10	9	1,975,000,000	8	2,172,500,000	7	2,389,750,000	7	6,537,250,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Cakupan desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	%	100	100	1,925,000,000	100	2,117,500,000	100	2,329,250,000	100	6,371,750,000	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	Desa/ kel	106	106	360,000,000	106	396,000,000	106	435,600,000	106	1,191,600,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Peserta	320	320	100,000,000	320	110,000,000	320	111,100,000	320	321,100,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondi si awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang melakukan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang melakukan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang melakukan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	50,000,000	320	55,000,000	320	55,550,000	320	160,550,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	Klp	320	320	15,000,000	320	16,500,000	320	18,150,000	320	49,650,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Klp	320	320	1,100,000,000	320	1,650,000,000	320	1,815,000,000	320	4,965,000,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kecamatan yang melakukan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Kecamatan yang melakukan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kecamatan yang melakukan Advokasi dan Promosi IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Kecamatan yang Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec	11	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30,250,000	11	82,750,000	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Cakupan kelompok masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Satuan	Kondisi awal 2022	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pagu						Kondisi akhir Priode Renstra SKPD ( 2026)		Unit Kerja OPD P.Jawab
					2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kelompok yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (perayaan Hari Keluarga Nasional(HARGANAS) Provinsi dan Pusat	Klp	320	320	12,500,000	320	13,750,000	320	13,887,500	320	40,137,500	Dinkes, Dalduk dan KB



## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB VII.**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN KESEHATAN, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KB**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang menjabarkan tujuan 2 yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sasaran 3 yaitu Meningkatkan kualitas SDM.

Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana mengurus 2 (dua) urusan yaitu:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Kesehatan)
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
1	Usia Harapan Hidup ( UHH )	70.41	70,60	70,80	71,01	71,01
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	3	5	4	3	3
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,0	1	0,8	0,5	0,5
4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,16	8	7	6	6
5.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,31	7,5	7,1	6,9	6,9
6.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,0011	0,009	0,009	0,009	0,009
7.	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	202	300	300	300	300
8.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	39	< 1	< 1	< 1	< 1
9.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100	100	100	100
10.	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100	100	100
11.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	80	82	83	85	85
12.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	90	95	95	95	95
14.	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2.19	2	2	2	2
15.	Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2.07	2	2	2	2
16.	Ratio Akseptor KB	54.29	100	100	100	100

**Tabel 7.1**  
**Keselarasn RPD dan Renstra**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator sasaran RPD	Tujuan Restra Perangkat Daerah	Sasaran Restra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Restra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat daerah			Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan Renstra
								2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM.	Indeks kesehatan	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Indeks Kesehatan	77,55	77,75	77,95	78,25	78,25
							2. Usia Harapan Hidup (UHH)	70.41	70,60	70,80	71,01	71,01
							3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	3	5	4	3	3
							4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,0	1	0,8	0,5	0,5
					2. Terwujudnya keluarga sejahtera	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	5. Indeks Pembangunan Keluarga ( Bangsa)	58,20	60	61	62	62
					6. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,07	2	2	2	2		

## 7.1 Indikator Kinerja Utama ( IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, ini ditampilkan dalam Tabel 7.2

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama ( IKU )**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,12	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,54	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,40	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	82,25	100	100	100	100
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,73	100	100	100	100
6.	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	72,97	100	100	100	100
7.	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	75,86	100	100	100	100
8.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,46	100	100	100	100
9.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,31	100	100	100	100
10.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,35	100	100	100	100
11.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100
12.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	97,33	100	100	100	100
13.	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2.19	2	2	2	2
14.	Ratio Akseptor KB	54.29	100	100	100	100

## 7.2 Indikator Kinerja Kunci ( IKK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai indikator peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 dan permendagri nomor 18 tahun 2020 sesuai dengan urusan kewenangan pemerintah daerah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Kunci ( IKK )**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
14	Angka Usia Harapan Hidup	1	1	1	1	1
15	Persentase Balita Gizi Buruk	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01
28	Prevalensi Balita Gizi Kurang	6,16	7,5	7	6,5	6,5
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	1,0	1	0,8	0,5	0,5
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	240	250	240	230	230
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	10,3	10	9,5	9	9
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	3	5	4	3	3
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	1:74	1:70	1:70	1:70	1:70
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:4.972	1:4.985	1:4.990	1:4.998	1:4.998
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:107.735	1:107.745	1:107.750	1:107.755	1:107.755
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	1:6.628	1:6.629	1:6.630	1:6.631	1:6.631
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:8.973	1:8.983	1:8.991	1:8.997	1:8.997
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	151	100	100	100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,7	100	100	100	100
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	89,6	100	100	100	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data	Tidak da data

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,2	100	100	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,76	2	2	2	2
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	9,8	50	50	50	50
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	63	80	85	85	85
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	202	300	300	300	300
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	10,2	< 5	< 5	< 5	< 5
2.22a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	656	1.163	1.163	1.163	1.163
2.22b	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	63	80	80	80	80
2.23a	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Belum ada data	90	90	90	90
2.23b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Belum ada data	90	90	90	90
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	2,127	8,997	9,897	10,887	10,887
2.26a	Angka kejadian Malaria	39	< 300	< 300	< 300	< 300
2.26b	Angka kejadian Malaria	0.13	= < 1	= < 1	= < 1	= < 1
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0
2.30a	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	36	30	30	30	30
2.30b	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.011	0.009	0.009	0.009	0.009
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Tidak tersedia data	100	100	100	100
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Tidak tersedia data	80	80	80	80
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	-
2.34	Cakupan kunjungan bayi	104	95	95	97	97
2.35	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,5	95	96	97	97

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.38	Cakupan pelayanan nifas	99,6	95	96	97	97
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	56,7	80	85	85	85
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	99,7	100	100	100	100
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat					
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin					
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)					
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>					
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)					
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.19	2	2	2	2
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	37.5	100	100	100	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37.5	100	100	100	100
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	2	3	4	5	5
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	9	26	26	26	26
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	427	430	435	440	440
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.07	2	2	2	2
8.9	Ratio Akseptor KB	54.29	100	100	100	100
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	31	30	20	10	10
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		30	20	10	10
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8.32	3	2	1	1
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		100	100	100	100
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		100	100	100	100
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	100	100
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	100	100	100	100	100
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	100	100	100	100	100
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	2	2	2	2
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa					
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	36.79	100	100	100	100
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	100
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	103.7	100	100	100	100
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)					
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	keluarga melalui 8 fungsi keluarga					
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100	100	100	100	100
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	20	20	20	20
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes					

### 7.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

**Tabel TC-7.3**  
**Target Indikator Standar Pelayanan Minimal**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2023-2026**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	83,12	100	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	95,54	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,40	100	100	100	100
4	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	82,25	100	100	100	100
5.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	98,73	100	100	100	100
6.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	72,97	100	100	100	100
7.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	75,86	100	100	100	100
8.	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	27,46	100	100	100	100
9.	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	94,31	100	100	100	100
10.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	96,35	100	100	100	100
11.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100	100	100	100	100
12.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	97,33	100	100	100	100

## 7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Tabl . 7.5

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)</b>					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Ke 1	106 Desa/Kel
<b>2</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)</b>					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99,7	100	100	100	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100	80	80	80	80
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	54,29	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)</b>					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	4 Kasus	6 Kasus	217	205	194
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,16	8	7	6	6

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,31	7,5	7,1	6,9	6,9
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	6,51	7,5	7,1	6,9	6,9
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,98	5	4,5	4	4
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	8,67	15	14	13	13
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	64,5	50	55	60	60
<b>4</b>	<b>PILAR SOSIAL (Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera)</b>					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	3	5	4	3	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	99,7	100	100	100	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99,3	100	100	100	100
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	10,3	10	9,5	9	9
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1,0	1	0,8	0,5	0,5
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	100	100	100	100
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,0011	0,009	0,009	0,009	0,009
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	202	300	300	300	300
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	39	< 1	< 1	< 1	< 1

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	23	< 1	< 1	< 1	< 1
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		8,7	8,7	8,7	8,7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	0,2	0,34	0,34	0,34	0,34
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0,39	0,23	0,23	0,23	0,23
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	11	11	11	11	11
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.					
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.					
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.					
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		30	20	20	20
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.19	2	2	2	2
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	8.32	3	2	1	1
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.					
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90	95	95	95	95
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.					
<b>5</b>	<b>PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjangan Gender)</b>					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	8.32	3	2	1	1
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.					



## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
TAHUN 2024 - 2026**

## **BAB VIII.**

### **PENUTUP**

Renstra (Rencana Strategis) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan yang terbaru Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia instruksi menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru. Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang memuat tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini Kabupaten Sidenreng

Rappang maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan demikian perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



